

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

BALAI BESAR POM DI SURABAYA



BALAI BESAR POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

Jalan Karang Menjangan No.20 Surabaya



bpom_surabaya@pom.go.id



031-5020575, 5048833

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR HK.02.02.11A.12.25.297 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SURABAYA TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 05 Desember 2025
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA



YUDI NOVIANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SURABAYA NOMOR HK.02.02.11A.12.25.297
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SURABAYA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di cakupan wilayah BBPOM di Surabaya di Provinsi Jawa Timur aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BBPOM di Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPOM turut mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas Fungsi BBPOM di Surabaya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. pelaksanaan sertifikasi penilaian ekspor dan impor produk Obat dan Makanan
- e. pelaksanaan sertifikasi penerapan cara produksi yang baik untuk fasilitas

- produksi Obat dan Makanan
- f. pelaksanaan penilaian penerapan cara distribusi yang baik dalam rangka sertifikasi fasilitas distribusi Obat
 - g. pelaksanaan sampling produk Obat dan Makanan
 - h. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan serta penandaan/label produk tembakau dan rokok elektronik
 - i. pelaksanaan pengujian produk Obat dan Makanan dalam rangka pemeriksaan dan pelayanan publik
 - j. pengelolaan laboratorium sesuai dengan standar kemampuan laboratorium di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - k. pelaksanaan pengujian produk Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan termasuk kejadian luar biasa keracunan pangan
 - l. pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini tindak pidana di bidang Obat dan Makanan
 - m. pelaksanaan intelijen di bidang Obat dan Makanan
 - n. pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan
 - o. pelaksanaan penelusuran dan patroli siber serta penjejak digital pelanggaran peredaran Obat dan Makanan secara daring
 - p. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - q. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi farmakovigilans kejadian tidak diinginkan atau efek samping obat pada fasilitas pelayanan kesehatan
 - r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - s. pemberdayaan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - t. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - v. pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen risiko
 - w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Selain fungsi tersebut, BBPOM di Surabaya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM juga turut serta melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.



Gambar 1. 1 Wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Wilayah kerja BBPOM di Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 11100 Bujur Timur – 11404' Bujur Timur dan 70 12'Lintang Selatan – 8048'Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km². Jumlah penduduk sebanyak 41.644.099 jiwa dan kepadatan penduduk 867 jiwa/km². Provinsi Jawa Timur meliputi 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Dari 38 kabupaten/kota tersebut, wilayah kerja BBPOM di Surabaya yaitu sebanyak 27 kabupaten/kota, Balai POM di Kediri sebanyak 6 kabupaten/kota dan Balai POM di Jember sebanyak 5 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat struktural yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi

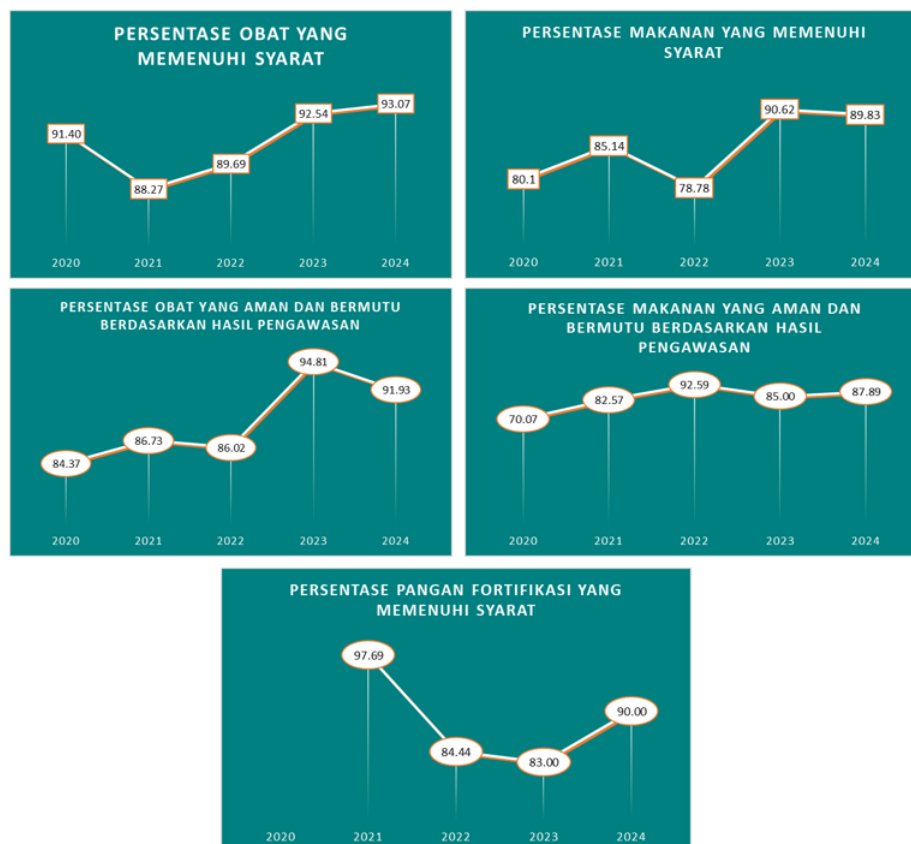
Kantor BBPOM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.165 m² dan luas bangunan 4.946 m², serta 2 (dua) gudang (ruko) untuk penyimpanan barang bukti dengan luas tanah 132 m² dan luas bangunan 462 m². Sarana prasarana yang dimiliki terdiri dari laboratorium dengan peralatan yang memadai sesuai standar laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini serta sarana prasarana pelayanan publik mencakup layanan kelompok rentan yang sudah diakui oleh Kementerian PAN RB dengan diperolehnya predikat “Pelayanan Prima”. BBPOM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Surabaya periode 2025-2029 merupakan wujud respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra ini dirancang tidak hanya untuk menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BBPOM di Surabaya tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini. Proses penyusunan renstra BBPOM di Surabaya didasarkan pada evaluasi capaian kinerja tahun 2020 - 2024 serta masukan-masukan dari stakeholder. Renstra BBPOM di Surabaya periode 2025 - 2029 diharapkan dapat meningkatkan kinerja BBPOM di Surabaya dibanding periode renstra sebelumnya.

I.1.1 Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BBPOM di Surabaya. Hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra pada tahun 2020 - 2024 yang terdiri dari 11 sasaran kegiatan dan 34 indikator kinerja sasaran kegiatan dijelaskan sebagai berikut.

1. Sasaran kegiatan 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT, diukur dengan indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Tren realisasi Indikator Persentase Obat (sampel acak) yang memenuhi syarat mengalami peningkatan hingga tahun 2024, berbeda dengan realisasi Persentase Obat (sampel targeted) yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang sedikit menurun di tahun 2024.



Gambar 1. 3 Tren realisasi indikator sasaran kegiatan 1

Pada tahun 2020 dan 2021 ditemukan bahwa sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan tertinggi dibandingkan komoditi

lainnya. Di tahun 2022, penandaan sampel kosmetik yang TMK karena tidak mencantumkan 2D Barcode memberikan kontribusi terbesar terhadap tidak tercapainya target. TMK penandaan kosmetik masih mendominasi di tahun 2023, sedangkan hasil pengujian tidak memenuhi syarat (TMS) uji mikrobiologi terbanyak adalah sampel obat tradisional. Di tahun 2024 hasil uji mikrobiologi sampel obat tradisional yang TMS masih tertinggi, sedangkan TMK penandaan tertinggi tidak lagi kosmetika namun obat tradisional. Meskipun demikian, sampel sediaan farmasi yang TMS maupun TMK secara tren mengalami penurunan.

Realisasi indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan mengalami tren kenaikan dari tahun 2020, dan agak turun di tahun 2024. Realisasi indikator ini lebih rendah dibandingkan indikator pertama karena cara pengambilan sampel yang berbeda yaitu secara acak pada indikator pertama dan tertarget pada indikator ini. Sampel yang ditarget adalah sampel yang memiliki riwayat TMS di tahun sebelumnya maupun sampel yang diperkirakan akan TMS. Sama seperti indikator pertama, penandaan sampel kosmetik yang TMK karena tidak mencantumkan 2D Barcode juga memberikan kontribusi terbesar terhadap tidak tercapainya target. Di tahun 2023 dan 2024, sampel obat tradisional mendominasi sampel TMS. Sedangkan sampel TMK tertinggi di tahun 2023 adalah sampel obat tradisional dan sampel kosmetik merupakan TMK tertinggi di tahun 2024.

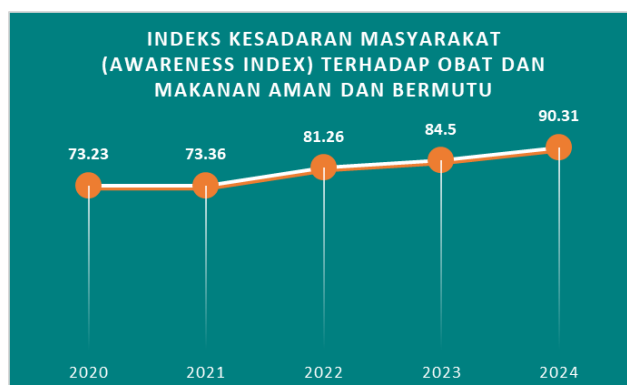
Realisasi indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat dari tahun 2020-2024 didominasi oleh makanan yang TMS hasil uji dibandingkan TMK penandaan. Penyebab dari TMS hasil uji antara lain penggunaan pengawet yang melebihi batas, penggunaan pemanis yang dilarang seperti sakarin siklamat, penggunaan pewarna dilarang, kadar sulfit pada gula yang tidak sesuai standar, dan TMS uji cemaran mikroba.

Persentase Makanan (acak) yang memenuhi syarat cenderung mempunyai realisasi lebih tinggi dibandingkan persentase Makanan (targeted) yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan karena adanya perbedaan cara pengambilan sampel. Meningkatnya realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di tahun 2021 dan 2022 dipengaruhi oleh sampel PJAS dan sampel dari UMKM dalam rangka registrasi sebagai dampak inovasi Gempur Jatim yang menggratiskan biaya uji sampel di laboratorium BBPOM di Surabaya. Jenis pangan sampel PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) sudah ditentukan oleh pusat dan dengan adanya intervensi dari BBPOM Surabaya mengenai pangan PJAS menyebabkan sampel yang disampling banyak yang memenuhi syarat. Di tahun 2023 dan 2024 masih juga ditemukan sampel PJAS yang mengandung pemanis dilarang dan tercemar mikroba. Selain itu juga ditemukan sampel UMKM dan AMDK

yang mengandung cemaran mikroba, sampel kasus mengandung babi, formalin dan pengawet melebihi batas.

Indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat baru dimunculkan di tahun 2021. Sampel pangan fortifikasi terdiri dari garam beryodium, tepung (Fe), dan minyak goreng (vitamin A). Pada tahun 2021, pengambilan sampel dilaksanakan di Kabupaten Gresik, sedangkan pada tahun 2022 pengambilan sampel dilaksanakan di Probolinggo. Terdapat lonjakan sampel TMS di tahun 2022 karena tingginya sampel garam yang tidak memenuhi standar kadar KIO₃. Sampling fortifikasi di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya pada tahun 2023 didominasi oleh tingginya minyak goreng yang tidak mengandung vitamin A. Pada tahun 2024, pangan fortifikasi yang memenuhi syarat kembali meningkat, meskipun masih juga ditemukan minyak goreng yang tidak mengandung vitamin A dan garam beryodium yang tidak sesuai standar di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan. Beberapa penyebab tidak terpenuhinya syarat fortifikasi adalah penyimpanan produk yang tidak sesuai sehingga fortifikan menguap, penambahan fortifikan (iodium) dilakukan secara manual sehingga tidak merata, serta kurangnya fasilitas produksi untuk penambahan vitamin A pada minyak goreng.

2. Sasaran kegiatan 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT, diukur dengan indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.



Gambar 1. 4 Tren Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Terdapat tren peningkatan indeks kesadaran masyarakat dari tahun 2020 (73,23) hingga tahun 2024 menjadi 90,31. Rendahnya indeks di tahun 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh isu vaksin covid 19 dan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak akibat kasus EG DEG. Hasil survey kesadaran (awareness) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2022 didapatkan bahwa nilai pengetahuan masyarakat adalah 84,47; nilai sikap masyarakat adalah 84,21 dan nilai perilaku masyarakat adalah 75,11. Terdapat penurunan nilai perilaku masyarakat di tahun 2023. Pada tahun

2023 indeks kesadaran masyarakat meningkat, dengan nilai pengetahuan masyarakat secara nasional adalah 89,32; nilai sikap masyarakat adalah 88,16 dan nilai perilaku masyarakat turun menjadi 76,51. Kemudian indeks sangat meningkat di tahun 2024 dengan nilai pengetahuan masyarakat adalah 95,08; nilai sikap masyarakat adalah 91,26 dan nilai perilaku masyarakat adalah 84,60. Dari hasil survey diketahui bahwa komponen perilaku memperoleh nilai paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan. Metode dan materi penyuluhan/KIE kepada masyarakat harus didesain secara menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dikemas dengan bahasa yang sederhana dengan memanfaatkan keragaman budaya di Jawa Timur serta dengan memanfaatkan pengaruh tokoh masyarakat, pemuka agama, dan komunitas komunitas masyarakat yang telah terbentuk.

3. Sasaran kegiatan 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT, diukur dengan indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT.



Gambar 1. 5 Tren realisasi indikator pada sasaran kegiatan

3

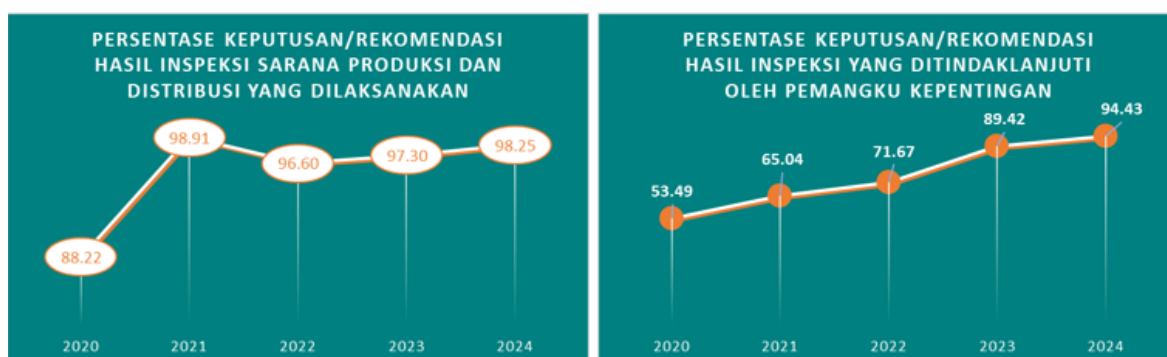
Tren dari ketiga indikator menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Hanya 1 indikator yang menurun di tahun 2021 yaitu indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini disebabkan isu terkait vaksin covid 19 yang banyak memojokkan BPOM. Namun demikian, kepercayaan masyarakat kembali pulih ditandai dengan meningkatnya nilai indeks tersebut hingga akhir 2024. Keberhasilan pencapaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dipengaruhi adanya inovasi Gempur Jatim yang telah dilaksanakan dari tahun 2019 hingga sekarang, dimana pelaku usaha merasa puas dengan bimbingan dari BBPOM di Surabaya, sehingga produknya bisa mendapatkan nomor registrasi dalam waktu yang relatif cepat dibandingkan sebelum ada inovasi Gempur Jatim. Selain itu juga diciptakan inovasi Klinik POM bekerja sama dengan DPMPTSP di hampir semua kab/kota di Jawa Timur yang merupakan pendampingan kepada pelaku usaha sebagai upaya percepatan penerbitan Nomor Izin Edar (NIE).

Pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan mengalami peningkatan setelah kasus vaksin covid 19. Upaya pengawasan mendapat nilai 80,07, upaya penindakan 81,20, pemberian informasi 79,04 dan jaminan keamanan produk 80,27. Survey juga melakukan pengukuran Indeks Kepuasan atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan komoditi dengan rincian sebagai berikut: obat 81,24; obat tradisional 78,07; suplemen Kesehatan 80,11; kosmetik 79,78 dan pangan olahan 80,67. Indeks ini kembali meningkat di tahun 2024 sebagai hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan seperti inovasi cangkruan (Bincang dengan Kru Layanan), perbaikan web site BBPOM di Surabaya yang menampilkan seluruh informasi tentang Obat dan makanan serta kinerja secara rutin, juga perbaikan konten media sosial dan elektronik sehingga masyarakat lebih memahami kinerja pengawasan Obat dan makanan yang telah dilakukan setiap tahun. Upaya pendekatan kepada masyarakat juga dilakukan melalui inovasi Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary) yang merupakan program pendampingan dan bimbingan teknis serta stikerisasi untuk para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang biasanya berlokasi di daerah daerah wisata seperti kota Batu, kota Pasuruan dan kota Surabaya.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT merupakan survei penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan terdiri dari 9 unsur penilaian sesuai pedoman PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017. Tren menunjukkan indeks yang semakin meningkat hingga tahun 2024. Perbaikan nyata selalu dilakukan BBPOM di Surabaya terhadap semua kritik dan saran yang diberikan pengguna layanan setiap tahunnya sehingga konsumen merasa nyaman dengan

semua pelayanan dan fasilitas yang disediakan yang bahkan lengkap untuk kelompok rentan hingga mendapat penghargaan Terbaik Unit Lokus Evaluasi PEKP3 dan Terbaik Unit Penyediaan Sarana Kelompok Rentan dari Menpan RB.

4. Sasaran kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT, diukur dengan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Indeks Pelayanan Publik UPT, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

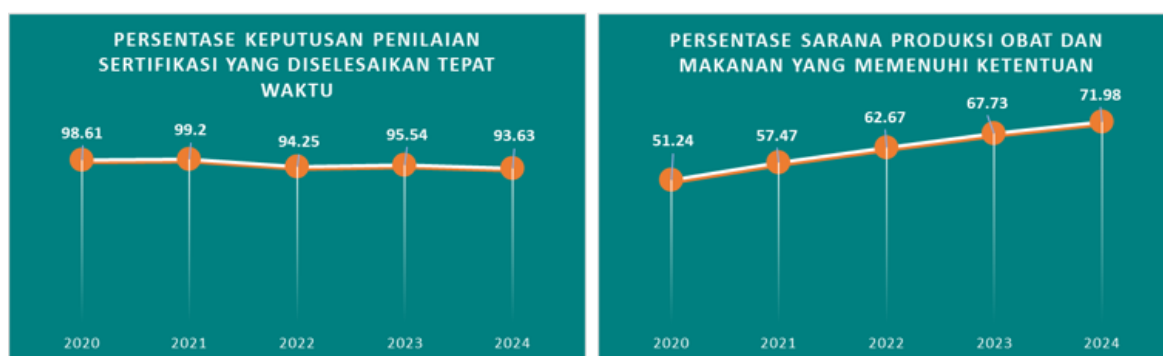


Gambar 1. 6 Tren realisasi indikator keputusan/rekomendasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2020 ke 2021 menunjukkan perbaikan kinerja petugas dalam menindaklanjuti semua rekomendasi baik dari pusat, UPT lain maupun dari pemangku kepentingan. Realisasi sedikit menurun di tahun 2022 dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 98,25%. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah rekomendasi yang diterima yang harus segera ditindaklanjuti, mengingat tingginya jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan makanan di Jawa Timur.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan menunjukkan tren selalu meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi 94,43%. Hal

ini menggambarkan peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menindaklanjuti semua temuan hasil inspeksi petugas BBPOM di Surabaya pada sarana produksi dan distribusi Obat dan makanan. Kesadaran ini juga dipicu oleh upaya jemput bola yang dilakukan BBPOM di Surabaya berupa pelaksanaan desk CAPA secara berkala sehingga mempercepat pelaku usaha dalam menyusun perbaikan (CAPA). Peningkatan juga ditunjukkan dari respon lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan IRTP. Koordinasi dengan lintas sektor yang semakin membaik berpengaruh terhadap peningkatan realisasi indikator.

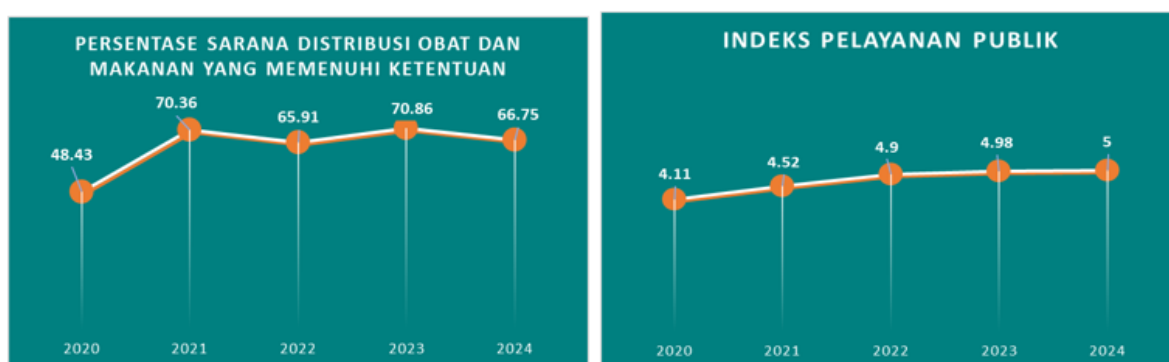


Gambar 1. 7 Tren realisasi indikator sertifikasi dan sarana produksi obat dan makanan

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 sebesar 98.61% menjadi 93,63% di tahun 2024. Peningkatan jumlah permintaan Surat Keterangan Import (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) setiap tahun menambah beban petugas dalam mengevaluasi dokumen agar tetap memenuhi standar waktu pelayanan. Peningkatan permintaan ini tidak diiringi dengan peningkatan jumlah SDM layanan sehingga terjadi penurunan kinerja setiap tahun. Selain itu, layanan berbasis elektronik juga sering mengalami kendala dari sistem yang dibangun oleh BPOM sehingga layanan seringkali melewati batas waktu yang ditentukan. Layanan sertifikasi lain yang juga dilakukan antara lain Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (IP CPPOB), Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, dan Sertifikasi CDOB.

Indikator selanjutnya adalah persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Terdapat tren peningkatan dari tahun 2020 sebesar 51,24% menjadi 71,98% di tahun 2024. Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa terdiri dari sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak

bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Kemudahan izin berusaha melalui OSS RBA dimana BBPOM di Surabaya memberikan contoh dokumen Standar Operasional Presedur (SOP) untuk diadaptasi oleh UMKM pada saat pengajuan Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB) ternyata tidak diiringi dengan implementasi yang konsisten pasca izin diterbitkan menjadi salah satu penyebab masih tingginya sarana produksi yang belum memenuhi ketentuan. Oleh karena itu kegiatan bimtek pelaku usaha dan desk capa bagi sarana yang TMK senantiasa dilakukan secara berkala dengan topik bimtek yang disesuaikan dengan kajian hasil pemeriksaan sarana.



Gambar 1. 8 Tren realisasi indikator sarana distribusi dan indeks pelayanan publik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan secara tren mengalami peningkatan dari 48,43% di tahun 2020 menjadi 66,75% di tahun 2024. Terjadi fluktuasi capaian diantara tahun 2021 hingga tahun 2023 yang dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan sarana distribusi Obat dan makanan terhadap standar cara distribusi yang baik. Selain itu, penetapan sarana pemeriksaan sarana distribusi obat telah menggunakan analisis resiko, dimana sarana dengan analisis resiko tertinggi yang akan diperiksa. Beberapa hal ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain terdapat sarana yang masa berlaku ijin nya sudah habis tetapi masih tetap melakukan penjualan obat, terdapat beberapa audit komprehensif dari PBF ke apotek dan diperoleh hasil apotek yang bertindak seperti distributor dan menyalurkan obat dalam jumlah besar ke paramedis dan perorangan, selain itu ditemukan juga PBF dan apotek yang melakukan panel penjualan obat. Beberapa sarana mendapatkan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan karena ditemukan temuan kritis terkait penyaluran obat. Selain itu juga masih banyak pelanggaran pada depot jamu terutama terkait menjual obat tradisional tanpa ijin edar.

Indeks pelayanan publik (IPP) BBPOM di Surabaya secara tren meningkat

setiap tahun dari 4,11 di tahun 2020 hingga mencapai nilai sempurna 5 di tahun 2024 dengan kategori “Pelayanan Prima”. Penilaian IPP meliputi 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan (bobot 30%), profesionalitas SDM (18%), sarana prasarana (15%), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%), Konsultasi dan Pengaduan (15%), Inovasi (7%) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pada tahun 2024, penyediaan 14 sarana prasarana bagi kelompok rentan dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah dipenuhi seperti kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat. Pencapaian ini diiringi juga dengan diterimanya penghargaan Terbaik Unit Lokus Evaluasi PEKP3 dan Terbaik Unit Penyediaan Sarana Kelompok Rentan dari Menpan RB.

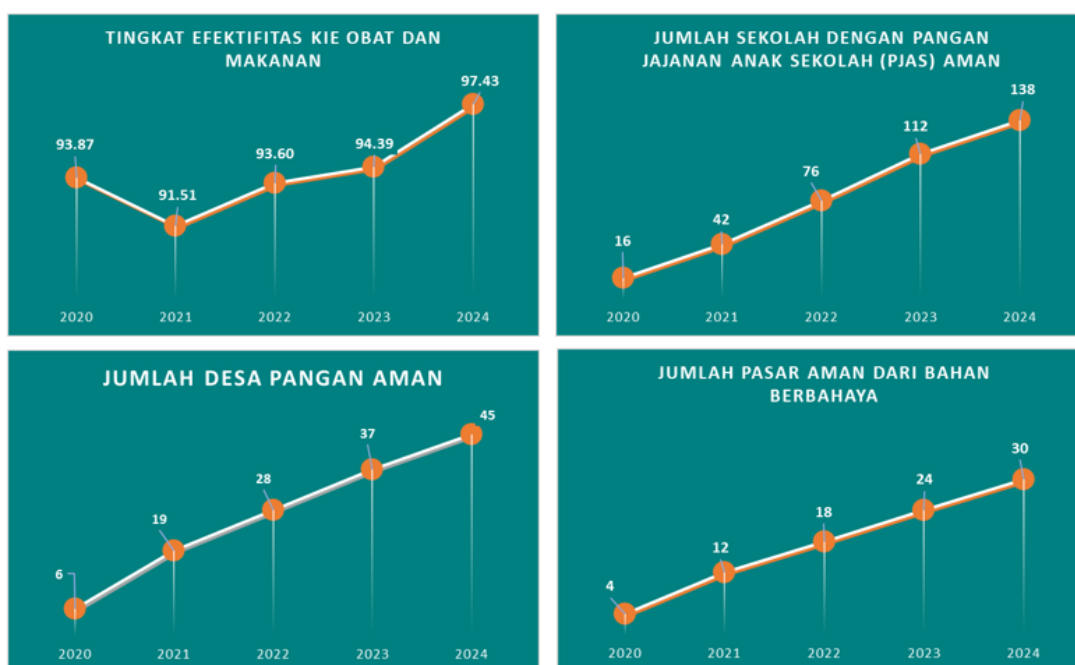


Gambar 1. 9 Tren realisasi indikator UMKM

Tren persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik menunjukkan peningkatan setiap tahun, dari 36,73% di tahun 2020 hingga mencapai nilai 100% di tahun 2024. Hal ini dikarenakan upaya pendampingan terus menerus dilakukan dengan upaya percepatan melalui kegiatan inovasi Gempur Jatim (pangan), Jatim Glowing (kosmetik), dan Sippotra (obat tradisional). Selain itu juga dilakukan upaya jemput bola melalui inovasi Klinik POM yang umumnya dilakukan di kantor DPMPSTP setempat. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsultasi denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan, asrot untuk

obat tradisional, dan notifikos untuk kosmetik. Terdapat peningkatan permohonan sertifikat IP CPPOB UMK Pangan Olahan, dari tahun 2023 sejumlah 545 menjadi 895 pengajuan di tahun 2024. Hal ini di antaranya disebabkan karena semakin banyaknya minat UMKM yang bergerak di bidang produksi pangan olahan

5. Sasaran kegiatan 5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT, diukur dengan indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.



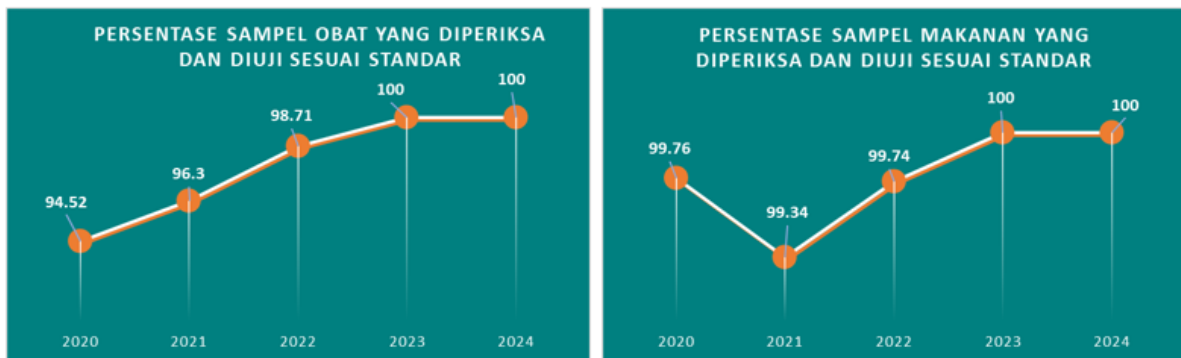
Gambar 1. 10 Tren realisasi indikator pada sasaran kegiatan 5

Pada indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan menunjukkan penurunan di tahun 2021 dari 93,87 menjadi 91,51 yang disebabkan adanya pandemi covid 19 sehingga KIE tidak dilakukan melalui tatap muka langsung. Selepas dari pandemi covid, tingkat efektifitas KIE meningkat terus hingga tahun 2024 menjadi 97,43. Upaya yang telah dilakukan antara lain konsistensi dalam merencanakan konsep, ragam, konten/materi kegiatan KIE/sosialisasi/penyebaran informasi yang terstruktur, sistematis, dan menarik. Perencanaan yang dimaksud termasuk pemilihan media yang diminati dan sesuai untuk kelompok yang disasar (seperti usia, domisili perkotaan/pedesaan, tren terkini, dll), baik menggunakan media langsung. media non elektronik, maupun media elektronik. Juga diperlukan penambahan variasi kegiatan khususnya pada saat KIE secara langsung (target peserta yang besar), seperti penyesuaian dengan kearifan lokal, senam Cek Klik, dll.

Upaya pemberdayaan kepada masyarakat juga dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal ini komunitas sekolah melalui program PJAS aman, desa pangan aman, dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Ketiga indikator tersebut mengalami tren kenaikan setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah komunitas yang diintervensi. Hingga tahun 2024, sebanyak 138 sekolah, 45 desa, dan 30 pasar telah diintervensi keamanan pangan. Seluruh komunitas tersebut telah melalui tahapan seperti advokasi BBPOM di Surabaya dengan pemerintah daerah, penentuan lokus, bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar yang selanjutnya kader tersebut akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Diharapkan akan semakin banyak wilayah yang mereplikasi program ini. Pendampingan yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya terbukti efektif dengan rutinnya komunitas tersebut mendapat juara pada lomba keamanan pangan yang diadakan oleh BPOM, baik untuk desa, sekolah maupun pasar dari tahun 2020 hingga 2024.

Desa Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk berhasil meraih peringkat II Lomba Desa Pangan Aman tahun 2020. Desa Brubuh Kabupaten Ngawi mendapat Juara 3 Lomba Desa Pangan Aman tahun 2022. SDI Al Akbar Kabupaten Mojokerto mendapat Juara II Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2022. SMP Negeri 22 Kota Malang mendapat Juara II Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2022. Juara 1 Sekolah dengan PJAS Aman tingkat SMP Regional Barat (SMPN 1 Lamongan) Tahun 2023. SDN Mojo VI Kota Surabaya memperoleh Juara I Tingkat Nasional Sekolah Regional Barat dengan PJAS Aman tahun 2024. SMPN 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo memperoleh Juara I Tingkat Nasional Sekolah Regional Barat dengan PJAS Aman tahun 2024. Pasar Nambangan Kota Surabaya Juara II Tingkat Nasional Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas untuk Regional Barat tahun 2024.

6. Sasaran kegiatan 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT, diukur dengan indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

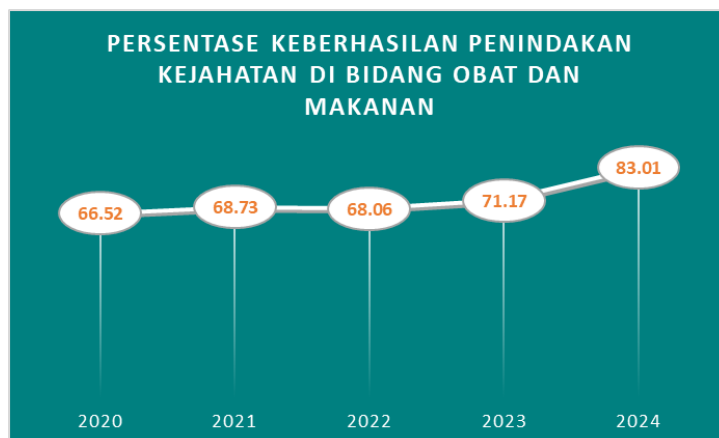


Gambar 1. 11 Tren realisasi indikator pada sasaran kegiatan 6

Indikator persentase sampel Obat dan sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, keduanya menunjukkan tren peningkatan hingga di tahun 2024 berhasil mencapai angka 100%. Pada tahun 2020 hingga 2022 masih ada beberapa sampel Obat dan makanan yang diuji melewati timeline pengujian yang ditentukan yaitu 30 hari kerja. Sejak tahun 2022 telah diterapkan sistem regionalisasi laboratorium, yang memungkinkan laboratorium mengirimkan sampel dari dan ke UPT lain sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan regionalisasi laboratorium. Setiap UPT diharapkan memiliki kekhususan kemampuan uji yang dilengkapi dengan alat laboratorium modern sesuai spesifikasi UPT tersebut.

Pada tahun 2020 hingga 2022 masih ditemui sampel Obat dan makanan yang tidak memenuhi timeline pengujian 30 hari kerja disebabkan karena menunggu perbaikan alat rusak, mengantri penggunaan instrumen yang digunakan dan kendala ketersediaan reagen dan baku pembanding. Kurang lebih 20% instrument di laboratorium BBPOM di Surabaya sudah berusia lebih dari 10 tahun bahkan ada yang berusia 20 tahun sehingga sering mengalami kerusakan. Dengan adanya regionalisasi, bila terdapat alat laboratorium yang rusak, maka penguji bisa melakukan pengujian di UPT yang mempunyai alat laboratorium dengan kondisi baik tersebut, begitu juga dengan kendala regensia dan baku pembanding. Sejak tahun 2024, Laboratorium BBPOM di Surabaya merupakan koordinator untuk regional timur yang terdiri dari BB/Balai POM di Denpasar, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende.

7. Sasaran kegiatan 7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT, diukur dengan indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

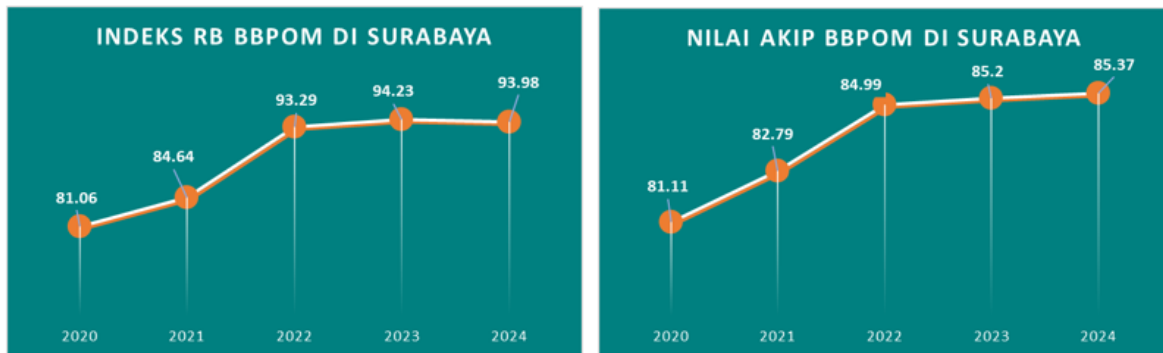


Gambar 1. 12 Tren realisasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Dalam kurun waktu 2020 – 2024, perkara tindak pidana obat dan makanan yang ditangani PPNS Balai Besar POM di Surabaya terlihat fluktuatif yaitu 12 perkara di tahun 2020, 6 perkara di tahun 2021, 11 perkara tahun 2022, 10 perkara tahun 2023 dan 9 perkara tahun 2024. Secara jumlah, penanganan perkara belum sebanding dengan kondisi banyaknya pelanggaran di lapangan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat terkait peredaran Obat dan Makanan ilegal. Di sisi lain, secara kualitatif penanganan perkara menunjukkan kualitas yang semakin membaik. Terlihat dari tren persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan menunjukkan peningkatan setiap tahun kecuali di tahun 2022 terjadi sedikit penurunan karena faktor eksternal. Kasus yang ditangani meliputi obat keras, obat tanpa izin edar, kosmetik tanpa izin edar, obat tradisional tanpa izin edar, obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), dan pangan tanpa izin edar.

Selama periode lima tahun tersebut BBPOM di Surabaya telah melakukan penyitaan produk ilegal dengan nilai keekonomian sebesar Rp23.041.602.950,- (dua puluh tiga milyar empat puluh satu juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Berbagai kendala ditemui selama proses penindakan baik dari internal maupun eksternal. Beberapa tersangka melarikan diri, sakit, dan meninggal dunia pada saat proses penyidikan sehingga proses seterusnya menjadi terhambat. Kompetensi PPNS di BBPOM di Surabaya juga perlu ditingkatkan agar kualitas penyidikan lebih baik dan tepat sasaran. Koordinasi dengan CJS (*Criminal Justice System*) di Provinsi Jawa Timur yang masih lemah juga harus dijalin dengan baik agar seluruh rangkaian proses penyidikan hingga hasil putusan dapat berjalan efektif.

8. Sasaran kegiatan 8: Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal, diukur dengan indikator Indeks RB UPT, Nilai AKIP UPT, dan Nilai Pengelolaan Kearsipan.



Gambar 1. 13 Tren realisasi indikator pada sasaran kegiatan 8

Indeks RB BBPOM di Surabaya selalu meningkat setiap tahun dari 81,06 di tahun 2020, kemudian sedikit menurun di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 menjadi 93,98 karena jumlah responden yang kurang sehingga nilai survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) turun. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sudah diraih di tahun 2017, sedangkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berhasil diraih di tahun 2021. BBPOM di Surabaya berkomitmen untuk menciptakan dan mengembangkan berbagai inovasi khususnya inovasi layanan publik dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan dan masyarakat seperti inovasi pendampingan UMKM Gempur Jatim (pangan), Jatim Glowing (kosmetik), Sippotra (obat tradisional), Klinik POM (konsultasi jemput bola), Cangkrū'an dll. Inovasi Gempur Jatim berhasil memperoleh penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di tahun 2023 dan Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam mengembangkan inovasi, peran Agent of Change (AOC) cukup menentukan arah reformasi birokrasi. AOC BBPOM di Surabaya telah mengembangkan 32 inovasi dan berhasil memperoleh penghargaan sebagai Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik I Tahun 2022 dan terbaik II tahun 2023.

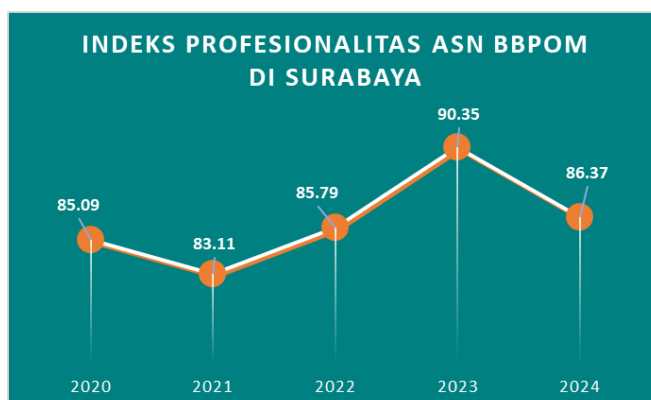
Sejak tahun 2020, nilai AKIP BBPOM di Surabaya sudah berhasil mencapai nilai A dan mendapat peringkat tertinggi dibandingkan seluruh UPT dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Tren nilai AKIP selalu meningkat setiap tahun hingga mendapat nilai 85,37 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan kuatnya komitmen BBPOM di Surabaya untuk menjaga akuntabilitas kinerja dan mempertanggungjawabkan dengan baik seluruh anggaran APBN yang digunakan untuk berkinerja selama 5 tahun. Perbaikan selalu dilakukan berdasarkan rekomendasi dari APIP. SKP pegawai telah disusun berdasarkan cascading kinerja dari eselon 2 dalam hal ini Kepala Balai ke ketua tim hingga ke anggota tim kerja.

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dan telah memiliki inovasi Sistem Pengelolaan

Database berupa QR Code yang langsung mengakses Manajemen File BBPOM di Surabaya (Standar Operasional Prosedur, capaian kinerja dan monitoring evaluasi kinerja) yang digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment dengan judul inovasi Raporku. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya nampak pada inovasi insight. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Selain itu juga telah diterapkan mekanisme reward dan punishment kepada individu di BBPOM di Surabaya, berupa penurunan ataupun kenaikan nilai SKP yang kemudian berpengaruh kepada besaran tunjangan kinerja yang diterima.

Indikator nilai pengelolaan kearsipan baru muncul di tahun 2024, dengan hasil yang cukup memuaskan yaitu 98,06 dan merupakan peringkat kedua dari seluruh UPT BPOM. Penataan arsip baik fisik maupun file sudah dilakukan sejak tahun 2021 dengan bantuan penyedia untuk kemudian dilanjutkan oleh arsiparis BBPOM di Surabaya. Aplikasi persuratan Srikandi juga telah aktif digunakan oleh seluruh pegawai untuk mempermudah aliran informasi dan disposisi dari atasan ke bawahan. Perlindungan terhadap semua arsip penting (sertifikat tanah, denah kantor, dll) senantiasa dioptimalkan agar tetap utuh dengan sistem penyimpanan yang terstandar.

9. Sasaran kegiatan 9: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT

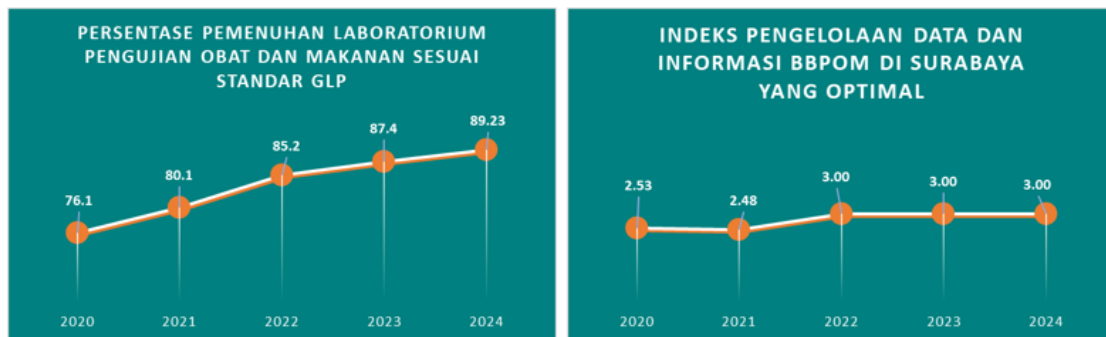


Gambar 1. 14 Tren realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT

Indeks profesionalitas (IP) ASN cenderung meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2024, namun menurun di tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan instrumen pengukuran IP ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 Dimensi yaitu kualifikasi pegawai (pendidikan jabatan), kinerja (nilai SKP), kompetensi,

dan disiplin (hukuman disiplin). Sesuai penilaian kinerja SKP, masih ada pegawai yang mendapat nilai SKP dibawah nilai Baik. Selain itu juga masih ditemukan pegawai yang belum mengikuti diklat fungsional tertentu nonPFM. Pembinaan pegawai senantiasa dilakukan terutama terhadap pegawai yang melanggar disiplin pegawai. Seluruh pegawai BBPOM di Surabaya selalu mengikuti pelatihan setiap tahunnya sebanyak 20 jam pelajaran per pegawai sehingga kompetensi setiap pegawai selalu terbarukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Obat dan makanan.

10. Sasaran kegiatan 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan, diukur dengan indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.



Gambar 1. 15 Tren realisasi indikator sasaran kegiatan 10

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP secara konsisten selalu mengalami peningkatan tiap tahun sejak 2020 hingga 2024 memperoleh nilai 89,23. GLP atau Standar Kemampuan Laboratorium merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian obat dan makanan; menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada laboratorium pengujian obat dan makanan; dan monitoring ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Pengelolaan laboratorium yang sesuai standar merupakan jaminan terhadap hasil pengujian sampel Obat dan Makanan sebagai upaya pengawasan *post market*.

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses

di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BOC, dan berita aktual pada subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Data dan informasi harus selalu dimutakhirkan di BOC untuk mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga digunakan pimpinan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan. Nilai maksimal untuk indeks ini adalah 3, dan nilai maksimal sudah diperoleh sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan tingginya pemanfaatan data dan informasi BBPOM di Surabaya.

11. Sasaran kegiatan 11: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel, diukur dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri.



Gambar 1. 16 Tren realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai kinerja anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Berbeda dengan tahun 2021 dan 2022, pada tahun 2020 tidak ada arahan dari pusat terkait kewajiban untuk mencapai target penyerapan anggaran semaksimal mungkin. Sehingga pada tahun 2020, nilai IKPA tinggi dan nilai komponen efisiensi pada nilai EKA juga tinggi. Pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator penilaian IKPA oleh Kementerian keuangan, yang semula 13 indikator menjadi 8 indikator saja. Penyerapan anggaran yang sangat tinggi meningkatkan nilai IKPA, namun menurunkan nilai EKA. Terdapat tren peningkatan nilai kinerja anggaran dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun pencapaian nilai IKPA cukup tinggi, namun masih kurang maksimal untuk mencapai target nilai kinerja anggaran. Beberapa komponen yang masih perlu

dimaksimalkan lagi nilainya di tahun 2024 adalah Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP dan TUP.

Indikator nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, nilai pengelolaan barang milik negara, dan persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri merupakan indikator yang baru muncul di tahun 2024 sehingga belum bisa dilihat trennya. Nilai pengelolaan barang jasa tahun 2024 adalah 90. Beberapa hambatan untuk mencapai nilai sempurna antara lain kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan penyedia barang dan jasa untuk melakukan upload dokumen pengiriman di aplikasi LPSE sehingga Pejabat Pembuat Komitmen bisa menilai dan menyelesaikan paket pengadaan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pejabat pengadaan sehingga beberapa pengadaan mengalami keterlambatan, serta masih ada pengadaan belanja modal yang tidak dilakukan lebih awal.

Nilai pengelolaan barang milik negara pada tahun 2024 adalah 98,44. Nilai ini diperoleh dari parameter ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN, ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN, jumlah PSP BMN dibandingkan total aset, jumlah penghapusan BMN rusak berat dibandingkan total aset rusak berat dan jumlah pemusnahan persediaan usang/rusak dibandingkan total persediaan usang/rusak. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan BMN telah dijalankan dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Harapannya kualitas pengelolaan BMN pada satuan kerja BBPOM di Surabaya selalu meningkat, serta dapat mengoptimalkan pengelolaan BMN pada satuan kerja di bawah lingkungan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Surabaya.

Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri (PDN) pada tahun 2024 adalah 78,29%. Indikator ini diukur berdasarkan perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri diupayakan untuk memberdayakan industri dalam negeri sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. BBPOM di Surabaya mengupayakan seoptimal mungkin untuk penggunaan PDN, meskipun sebagian besar kebutuhan sarana prasarana cukup sulit dipenuhi oleh PDN seperti alat laboratorium, reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding, glassware, dan suku cadang.

Tabel 1. 1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Surabaya Tahun 2020 – 2024

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Perspektif.1 Stakeholder																		
SS1.Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persen	80,80	91,40	113,12	91,00	88,27	97,00	91,50	89,69	98,02	92,00	92,54	100,59	92,54	93,07	100,58
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	78,00	80,10	102,69	80,00	85,14	106,42	82,00	78,78	96,07	84,00	90,62	107,88	90,62	89,83	99,13
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	80,80	84,37	104,42	84,00	86,73	103,25	86,60	86,02	99,33	90,00	94,81	105,34	94,81	91,93	96,96
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	50,00	70,07	120	70,00	82,57	117,96	72,00	92,59	128,60	73,00	85,00	116,44	85,30	87,89	103,04
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Persen				88	98	111,01	89	84	94,88	90	83	92,22	85,00	90,00	105,88
SS2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Indeks	73,00	73,23	100,32	76,00	73,36	96,53	79,00	81,26	102,86	81,00	84,50	104,32	84,50	90,31	106,88

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	82,00	82,60	100,73	83,60	84,50	101,08	84,70	94,20	111,22	85,70	96,40	112,49	96,40	97,26	100,89
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	71,00	74,18	104,48	75,64	66,55	87,98	77,09	78,14	101,36	78,85	80,14	102,02	80,14	86,56	108,01
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	89,50	91,50	102,23	90,00	91,72	101,91	90,50	91,80	101,44	91,00	91,98	101,08	92,50	93,04	100,58
Perspektif.2 Internal Process																		
SS4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persen	87,00	88,22	101,40	89,00	98,91	111,14	91,00	96,60	106,15	93,00	97,30	104,62	97,30	98,25	100,97
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persen	53,80	53,49	99,42	62,00	65,04	104,90	69,00	71,67	103,87	77,00	89,42	116,13	89,42	94,43	105,60
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persen	95,00	98,61	103,80	98,00	99,20	101,23	98,50	94,25	95,69	99,00	95,54	96,51	96,00	93,63	97,53

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	46,00	51,24	111,39	55,00	57,47	104,49	60,00	62,67	104,45	65,00	67,73	104,20	70,00	71,98	102,83
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	55,00	48,43	88,06	60,00	70,36	117,26	62,00	65,91	106,31	64,00	70,86	110,72	70,86	66,75	94,21
	15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,51	4,11	95,36	4,35	4,52	103,91	4,45	4,90	110,11	4,60	4,98	108,26	4,95	5,00	101,01
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persen	6,00	36,73	120,00	55,00	57,73	104,97	60,00	61,05	101,75	65,00	70,43	108,35	97,00	100,00	103,09
	17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Persen													95	99,18	104,40
SS5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Persen	70,00	93,87	105,11	91,10	91,51	100,45	92,92	93,60	100,73	93,38	94,39	101,08	95,20	97,43	102,34
	19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Jumlah	16,00	16,00	100	42,00	42,00	100,00	76,00	76,00	100	112,00	112,00	100,00	138	138	100

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
BBPOM di Surabaya	20	Jumlah desa pangan aman	Jumlah	6,00	6,00	100	19,00	19,00	100,00	28,00	28,00	100	37,00	37,00	100,00	45	45	100
	21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah	4,00	4,00	100	12,00	12,00	100,00	18,00	18,00	100	24,00	24,00	100,00	30	30	100
SS6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen	75,00	94,52	118,16	100,00	96,30	96,30	100,00	98,71	98,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen	75,00	99,76	120	100,00	99,34	99,34	100,00	99,74	99,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
SS7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persen	61,00	66,52	109,05	65,00	68,73	105,74	68,00	68,06	100,09	72,00	71,17	98,85	70,00	83,01	118,59
Perspektif.3 Learning & Growth																		
SS8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di	25	Indeks RB BBPOM di Surabaya	Indeks	91,00	81,06	89,08	84,70	84,64	99,93	87,20	93,29	106,98	89,70	94,23	105,05	95,23	93,98	98,69

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Surabaya yang optimal	26	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	Nilai	81,00	81,11	100,14	82,60	82,79	100,23	84,10	84,99	101,06	85,60	85,20	99,32	85,25	85,37	100,14
	27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai													96,50	98,06	101,62
SS9. Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	Indeks	75,00	85,09	113,45	85,00	83,11	97,78	85,25	85,79	100,63	85,50	90,35	105,67	90,86	86,37	95,06
SS10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Persen	80,00	76,10	95,13	78,00	80,10	102,69	83,00	85,20	102,65	88,00	87,40	99,32	88,74	89,23	100,55
	30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks	1,51	2,53	120,00	2,26	2,48	109,73	2,50	3,00	120,00	2,75	3,00	109,09	3,00	3,00	100,00
SS11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	Nilai	93,00	99,18	106,65	93,40	90,66	97,07	94,00	90,95	96,76	95,20	90,24	94,79	90,31	93,51	103,54
	32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)	Nilai													96,43	90	93,33

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai													90,00	98,44	109,38
	34	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	Persen													60,00	78,29	130,48
	35	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Persen	92,00	100,00	108,70	92,00	100,00	108,70									

(Sumber: laporan Kinerja BBPOM Surabaya Tahun 2020,2021,2022,2023,2024)

I.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BBPOM di Surabaya memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BBPOM di Surabaya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BBPOM di Surabaya untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BBPOM di Surabaya dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengawasi peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BBPOM di Surabaya dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BBPOM di Surabaya dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Surabaya 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Timur tidak hanya memenuhi standar nasional, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Jawa Timur secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh BBPOM di Surabaya dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. BBPOM di Surabaya menjangk

feedback dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP). SKM dilakukan langsung kepada 483 responden masyarakat penerima layanan BBPOM di Surabaya. Sedangkan FKP dilakukan untuk mendapat masukan dalam penyusunan standar pelayanan publik dari komponen masyarakat yang diwakili oleh akademisi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, perwakilan asosiasi pelaku usaha, lintas sektor/OPD, Media, kelompok rentan, dan masyarakat umum. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah saran masukan dari masyarakat.

1. Pada jenis layanan Surat Keterangan Impor, diperoleh masukan permintaan untuk peningkatan respon petugas dalam konsultasi online (wa sertifikasi, telepon dan email sertifikasi); permintaan untuk petugas khusus konsultasi online; dan masih adanya perbedaan persepsi antar petugas dalam pemeriksaan dokumen
2. Pada jenis layanan Surat Keterangan Ekspor, diperoleh masukan supaya ebpom dapat diakses di hari libur/hari besar serta server semakin tangguh agar layanan semakin prima dan cepat dan permintaan penambahan jam pelayanan penerbitan SKI & SKE.
3. Pada jenis layanan sertifikasi CDOB, masukan yang diperoleh adalah penurunan biaya untuk perpanjangan izin sertifikasi CDOB dan adanya sistem notifikasi / pemberitahuan tertulis ke pengusaha yang masa berlaku izin CDOB nya hampir habis.
4. Pada jenis layanan Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), penerima layanan meminta supaya desk konsultasi lebih sering diadakan, dengan jumlah petugas yang memadai; perbaikan data dari pengajuan CPPOB agar dapat disampaikan sekaligus dari awal, dan waktu respon sistem sebaiknya sesuai dengan SOP yaitu 20 hari kerja.

Sedangkan masukan dari FKP sebagai berikut:

1. Belum ditetapkan tarif pengawasan fasilitas baik fasilitas produksi, distribusi maupun pelayanan kefarmasian
2. Selalu melakukan pengumuman hasil pengawasan dan pemantauan label, promosi dan iklan agar masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil pengawasan yang dilakukan BPOM.
3. Perlu dilakukan pemetaan kompetensi pemohon karena beberapa layanan publik memerlukan kompetensi tertentu dari pemohon. Jika perlu dilakukan sertifikasi terlebih dahulu untuk pemohon.
4. Perlu adanya edukasi kepada pemohon layanan publik agar tidak menggunakan jasa calo atau pihak ketiga.
5. Perlu juga ada standar digitalisasi untuk keamanan dan kenyamanan data pemohon.

6. Produk Layanan Publik diharapkan mudah dan sederhana serta jelas di setiap tahapannya.
7. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan menyusun regulasi untuk kerjasama pengawasan obat dan makanan sebagai tindak lanjut Inpres 3 dan Permendagri 47. Ada beberapa isu perijinan yang dapat diselesaikan bersama jika dibentuk Satgas/Pokja misalnya perijinan PBF Cabang. Juga adanya permasalahan pelaporan yang seharusnya dapat diintergrasikan dan difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Masih banyak masyarakat yang belum memahami penyelenggara layanan publik untuk perijinan tertentu (Dinas Kesehatan atau BBPOM Surabaya).
9. Permintaan pendampinga untuk industri menengah dan besar seperti yang diberikan BBPOM Surabaya kepada industri kecil/UMKM.
10. Masih sering terjadi kendala pada aplikasi e bpom. Selain itu mohon ada layanan konsultasi CAPA dan konsultasi denah industri kosmetik serta permintaan adanya layanan live chat.
11. Konten media sosial BBPOM Surabaya masih kurang menarik. Sesekali dapat ditampilkan saat BBPOM Surabaya melakukan pemeriksaan di sarana produksi/distribusi.
12. Beberapa prosedur pelayanan publik sebaiknya disederhanakan dan ringkas. Sebaiknya BBPOM Surabaya memperluas jejaring kerjasama dan membentuk fasilitator fasilitator di daerah.
13. Bisnis kosmetik melalui makloon yang sangat marak informasinya di berbagai media sosial sangat meresahkan. Masyarakat menganggap bisnis kosmetik sangat mudah dan menguntungkan.
14. Sarana dan prasarana untuk kelompok rentan sudah sangat lengkap. Berbagai aplikasi pendukung dapat dimanfaatkan dengan baik misalnya aplikasi hear me, dan keyboard huruf Braile.
15. Permintaan flexsibilitas untuk kriteria dan persyaratan layanan.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BBPOM di Surabaya menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BBPOM di Surabaya periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk Masyarakat.

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Surabaya, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BBPOM di Surabaya keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BBPOM di Surabaya di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Surabaya, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Pelayanan publik yang prima

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. BBPOM Surabaya telah berupaya mewujudkan pelayanan publik yang prima hingga memperoleh nilai sempurna 5 dari BPOM pada tahun 2024. mengukuhkan BBPOM di Surabaya sebagai unit penyelenggara layanan yang tidak hanya taat regulasi, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pencapaian nilai IPP kategori “Pelayanan Prima” menunjukkan bahwa BBPOM di Surabaya telah mampu mengelola enam aspek penilaian secara optimal, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Penguatan kebijakan pelayanan dilakukan melalui standarisasi prosedur yang selaras dengan Permenpan RB No. 17/2017, memastikan setiap unsur layanan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian bagi pengguna layanan.

Dari sisi sumber daya manusia, profesionalitas aparatur semakin meningkat melalui pengembangan kompetensi, internalisasi budaya pelayanan, serta peningkatan integritas sehingga pelayanan berlangsung cepat, akurat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kekuatan ini diperkuat oleh ketersediaan sarana dan prasarana layanan yang inklusif dan memenuhi standar pemenuhan hak kelompok rentan. Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya telah menyediakan 14 jenis sarana kelompok rentan, mencakup kursi roda, jalur landai, guiding block, lift dengan huruf braille, ruang laktasi, toilet khusus, ruang tunggu dan loket khusus, hingga fasilitas komunikasi seperti petugas berbahasa isyarat. Pemenuhan fasilitas ini bukan hanya memenuhi aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata BBPOM di Surabaya dalam menjamin aksesibilitas dan kesetaraan layanan bagi seluruh

lapisan masyarakat. Selain itu, sistem konsultasi dan pengaduan yang semakin responsif, berbasis digital, dan terintegrasi dengan SIPP memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi serta kecepatan tindak lanjut. Berbagai inovasi layanan, termasuk digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan pemanfaatan kanal komunikasi publik, turut memastikan bahwa layanan BBPOM di Surabaya relevan dengan kebutuhan zaman dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Kinerja unggul ini mendapatkan pengakuan nasional melalui penghargaan Terbaik Unit Lokus Evaluasi PEKP3 dan Terbaik Unit Penyediaan Sarana Kelompok Rentan dari Kementerian PANRB, yang sekaligus memperkuat reputasi dan kredibilitas institusi sebagai penyelenggara layanan publik berkinerja tinggi. Secara keseluruhan, keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mencapai dan mempertahankan standar pelayanan publik prima merupakan aset strategis yang memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Kekuatan ini menjadi fondasi penting untuk mendukung implementasi Renstra 2025–2029, memastikan organisasi tetap adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

2. Implementasi reformasi birokrasi dan pengawasan internal yang memadai BBPOM di Surabaya memiliki kekuatan strategis yang menonjol dalam implementasi Reformasi Birokrasi (RB), yang selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan positif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Jawa Timur. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang meningkat setiap tahun hingga 93,98 di tahun 2024 mencerminkan kemampuan organisasi dalam mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari akuntabilitas, transparansi, efektivitas, hingga pelayanan publik yang berorientasi hasil.

Keberhasilan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2017 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021 merupakan wujud nyata komitmen BBPOM di Surabaya dalam membangun integritas kelembagaan yang tinggi. Predikat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai capaian simbolis, tetapi sekaligus menunjukkan kestabilan sistem pengendalian gratifikasi, penegakan kode etik, serta budaya kerja yang bebas dari praktik korupsi. Integritas institusi ini menjadi prasyarat penting bagi pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan yang menuntut objektivitas, ketegasan, dan kepercayaan dari masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan birokrasi yang bersih dan melayani, setiap proses seperti pemeriksaan sarana, sampling, pengujian, sertifikasi, hingga penindakan dapat berjalan transparan dan profesional,

sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan memperkuat jaminan keamanan obat dan makanan di Jawa Timur.

Kekuatan lain yang menonjol adalah kapasitas inovasi yang terus berkembang secara sistematis. Sepanjang 2020–2024, BBPOM di Surabaya berhasil mengembangkan berbagai inovasi layanan publik yang diarahkan untuk menyederhanakan proses, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat dan UMKM. Berbagai inovasi unggulan seperti Gempur Jatim (pendampingan UMKM pangan), Jatim Glowing (kosmetik), Sippotra (obat tradisional), Klinik POM (layanan konsultasi jemput bola), serta forum interaktif Cangkrū'an telah berkontribusi langsung dalam meningkatkan pembinaan pelaku usaha dan mempercepat penyelesaian persoalan terkait keamanan produk. Inovasi Gempur Jatim bahkan mendapat pengakuan nasional melalui Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 dan Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan 2024, menunjukkan bahwa inovasi ini berdampak berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas binaan UMKM dan keamanan pangan di masyarakat. Dalam konteks pengawasan, inovasi-inovasi tersebut berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menurunkan risiko ketidaksesuaian produk, mempercepat proses pembinaan, serta memperluas jangkauan edukasi keamanan obat dan makanan di 27 kabupaten/kota wilayah kerja. Misalnya, melalui Klinik POM, pelaku usaha dapat mengakses konsultasi regulasi dan teknis secara lebih mudah dan cepat, sehingga mengurangi potensi pelanggaran. Demikian pula, program pendampingan intensif UMKM membantu mengurangi temuan produk tidak memenuhi ketentuan (TMK), meningkatkan kualitas produksi, dan memperkuat ekosistem usaha yang patuh regulasi. Kekuatan implementasi Reformasi Birokrasi juga ditopang oleh keberadaan Agent of Change (AOC) yang berperan sebagai motor penggerak perubahan. AOC BBPOM di Surabaya telah menghasilkan 32 inovasi sepanjang 2020–2024 dan secara konsisten mendorong internalisasi budaya kerja adaptif, kreatif, dan inovatif. Kinerja AOC mendapatkan pengakuan melalui penghargaan Tim Agen Perubahan Terbaik I Tahun 2022 dan Terbaik II Tahun 2023, yang menunjukkan efektivitas mereka dalam menguatkan nilai-nilai organisasi, mendorong perubahan proses bisnis, dan memastikan keberlangsungan reformasi birokrasi. Keberadaan AOC mempercepat transformasi internal yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan pengawasan. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Reformasi Birokrasi menjadi kekuatan mendasar (*foundational strength*) yang mendorong kapasitas BBPOM di Surabaya dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara efektif, kredibel, dan berintegritas. Birokrasi yang bersih dan melayani mendukung proses pengawasan yang

objektif; inovasi mempercepat dan memperluas jangkauan intervensi; dan budaya kerja profesional meningkatkan kualitas output pengawasan.

Selain kekuatan pada aspek RB dan inovasi, BBPOM di Surabaya juga memiliki pengawasan internal yang memadai, yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan. Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya mencatat nilai Indeks Maturitas Risiko sebesar 3,5, yang menunjukkan bahwa organisasi telah berada pada tingkat “Terdefinisi” menuju “Terkelola dan Terukur.” Nilai ini mencerminkan bahwa proses manajemen risiko telah dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, dan diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional, termasuk pada perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi, pengujian laboratorium, pengelolaan data intelijen pengawasan, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Maturitas risiko yang tinggi memberikan banyak keuntungan dalam konteks pengawasan obat dan makanan. Dengan identifikasi risiko yang lebih tajam, BBPOM di Surabaya dapat menentukan prioritas pengawasan berbasis risiko, mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal, mengantisipasi potensi pelanggaran, dan memperkuat pengendalian internal pada titik-titik kritis. Hal ini berkontribusi langsung dalam menekan peredaran produk berbahaya, meningkatkan capaian kepatuhan sarana, dan memperkuat sistem deteksi dini (early warning system) terhadap potensi ancaman keamanan obat dan makanan. Secara keseluruhan, implementasi Reformasi Birokrasi yang kuat, kapasitas inovasi yang berkembang, peran aktif AOC, serta tingkat maturitas manajemen risiko yang tinggi menjadi kekuatan kelembagaan yang sangat penting bagi BBPOM di Surabaya. Kombinasi kekuatan ini membentuk tata kelola pengawasan yang integratif, profesional, transparan, dan adaptif. Dengan fondasi ini, BBPOM di Surabaya memiliki modal strategis yang kokoh dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra 2025–2029, khususnya dalam memastikan keamanan, mutu, dan efektivitas obat dan makanan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta melindungi kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.

3. SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional, dengan spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi

Struktur SDM yang kuat yang kompeten, profesional, dan terspesialisasi sesuai kebutuhan tugas dan fungsi organisasi menjadi fondasi utama dalam memastikan pelaksanaan pengawasan yang efektif, terukur, dan mampu menjawab tantangan dinamika risiko obat dan makanan di Jawa Timur. Hingga tahun 2025, BBPOM di Surabaya didukung oleh 106 pejabat fungsional farmasi dan makanan dari total pegawai 144 atau 73,61%, yang berperan sebagai tenaga teknis utama dalam seluruh proses

pengawasan. Mereka memastikan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, audit dan inspeksi CPPOB/CPPOB/CPOTB, sampling dan pengujian laboratorium, penilaian izin edar, investigasi dan penindakan kasus, serta pembinaan pelaku usaha. 106 pejabat fungsional farmasi dan makanan terbagi menjadi 32 orang di fungsi pemeriksaan, 50 orang di fungsi pengujian, 14 orang di fungsi penindakan, dan 10 orang di fungsi penyuluhan. Jumlah dan kompetensi fungsional teknis yang memadai ini memberikan kapasitas yang kuat bagi BBPOM di Surabaya untuk melaksanakan pengawasan berbasis risiko secara merata di 27 kabupaten/kota Jawa Timur.

Di samping tenaga teknis utama, BBPOM di Surabaya diperkuat oleh SDM pendukung strategis dengan spesialisasi jabatan yang mendukung keseluruhan proses bisnis pengawasan, yaitu:

- a. 6 pejabat fungsional pranata komputer, yang memastikan kesiapan, keamanan, dan pengembangan sistem informasi pengawasan serta digitalisasi proses bisnis. Mereka berperan dalam pengolahan data intelijen pengawasan, integrasi SIPP, aplikasi monev, e-office, dan sistem laboratorium, sehingga kegiatan pengawasan semakin cepat, akurat, dan berbasis data.
- b. 4 pejabat fungsional keuangan APBN, yang menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan anggaran kegiatan pengawasan. Keberadaan tenaga ini memastikan anggaran digunakan tepat sasaran, selaras prioritas, dan mendukung pencapaian output strategis.
- c. 2 pejabat fungsional analis SDM, yang bertanggung jawab atas manajemen talenta, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, pemetaan beban kerja, serta pengelolaan kinerja. Ini memastikan SDM pengawasan selalu berada pada tingkat kompetensi yang relevan dengan tantangan pengawasan obat dan makanan.
- d. 4 pejabat fungsional arsiparis, yang memastikan pengelolaan arsip, dokumentasi pengawasan, dan rekam jejak kasus berjalan tertib, lengkap, dan mudah ditelusuri. Fungsi ini penting mengingat seluruh proses pengawasan memiliki implikasi hukum dan membutuhkan akurasi data yang tinggi.
- e. 5 pejabat fungsional perencana, yang memiliki peran strategis dalam menyusun perencanaan program dan anggaran, analisis kebijakan, pengendalian capaian kinerja, serta integrasi perencanaan berbasis risiko. Peran perencana memperkuat sinkronisasi antara kebutuhan lapangan (pengawasan) dan alokasi sumber daya, serta memastikan program pengawasan selaras dengan target nasional, RENSTRA BPOM, dan arah

pembangunan kesehatan di Jawa Timur. Keberadaan perencana yang kompeten menjadi pengungkit efektivitas program pengawasan, karena mereka memastikan setiap kegiatan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terukur.

Keterpaduan peran berbagai jabatan fungsional ini menghasilkan ekosistem SDM yang profesional, kolaboratif, dan saling melengkapi, sehingga mendukung efektivitas proses pengawasan secara menyeluruh, mulai dari regulasi, perencanaan, eksekusi lapangan, laboratorium, analisis data, hingga tindak lanjut dan pelaporan. Kompetensi dan spesialisasi SDM yang lengkap ini memberikan sejumlah keuntungan strategis, antara lain: pelaksanaan pengawasan berbasis risiko yang lebih tajam dan efisien; kecepatan respons terhadap temuan produk TMK dan kasus kedaruratan; peningkatan kualitas layanan pembinaan dan pendampingan UMKM; penguatan tata kelola dan akuntabilitas program; pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan modern; konsistensi dokumentasi dan validitas data pengawasan; manajemen organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Sebanyak 19 orang pegawai (13,19%) telah berpendidikan magister, 39 orang (27,08%) berpendidikan sarjana profesi apoteker, dan pendidikan sarjana umum sebanyak 63 pegawai (43,75%). Setiap tahunnya seluruh pegawai telah memenuhi pelatihan peningkatan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per pegawai. Dengan SDM teknis dan non-teknis yang profesional, kuat secara kapasitas, dan memiliki spesialisasi yang sesuai kebutuhan fungsi, BBPOM di Surabaya memiliki modal kelembagaan yang sangat kokoh untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang kredibel dan efektif di seluruh Jawa Timur.

4. Komitmen Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

BBPOM di Surabaya memiliki komitmen yang kuat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan inovasi digital untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen ini tercermin dari optimalisasi pemanfaatan berbagai sistem informasi internal yang terintegrasi dengan proses bisnis pengawasan obat dan makanan serta didukung oleh budaya kerja berbasis data. Salah satu bukti komitmen ini adalah capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang telah mencapai nilai maksimal “3” sejak tahun 2022 hingga 2024. Capaian ini menegaskan bahwa BBPOM di Surabaya telah memenuhi seluruh aspek pengelolaan data yang dipersyaratkan, meliputi ketersediaan, pemutakhiran, konsistensi, serta pemanfaatan data dan informasi dalam mendukung proses kerja organisasi. Pemenuhan nilai tertinggi selama tiga tahun berturut-turut menjadi bukti adanya tata kelola data yang solid, kedisiplinan

pemutakhiran informasi, dan integrasi digital yang efektif di seluruh unit kerja.

Pemanfaatan teknologi meliputi penggunaan email institusi, sistem sharing folder, dashboard Balai Operation Center (BOC), serta penyediaan berita aktual pada subsite Balai. Seluruh perangkat tersebut digunakan tidak hanya sebagai sarana komunikasi internal, tetapi juga sebagai instrumen pengolahan data, penyajian informasi, koordinasi lintas bidang, serta penyediaan bahan analisis untuk proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. BOC khususnya berfungsi sebagai pusat konsolidasi data pengawasan, tempat penyimpanan dan pengolahan data kinerja, serta media pemantauan real-time oleh pimpinan terhadap capaian kegiatan pengawasan. Ketersediaan data pengawasan yang terintegrasi dalam hal ini aplikasi SIPT juga memperkuat kemampuan institusi dalam melakukan analisis risiko, penyusunan kebijakan pengawasan berbasis bukti, dan pengendalian capaian kinerja organisasi. Komitmen terhadap pemanfaatan teknologi dan inovasi tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Jawa Timur melalui digitalisasi proses bisnis, percepatan alur informasi, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data, serta peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.

5. Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi dilengkapi dengan peralatan yang modern

Laboratorium BBPOM di Surabaya sudah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 yang diperoleh dari Komite Akreditasi Nasional/Badan Standardisasi Nasional (KAN/BSN). Akreditasi ini menegaskan bahwa sistem manajemen mutu, kompetensi teknis, dan keandalan hasil pengujian yang dihasilkan telah memenuhi standar internasional, sehingga memberikan jaminan kualitas yang kuat bagi seluruh kegiatan pengawasan obat dan makanan. Keunggulan kompetitif laboratorium BBPOM di Surabaya semakin diperkuat dengan keberadaan laboratorium uji rokok, yang hanya dimiliki oleh dua UPT BPOM di seluruh Indonesia. Keberadaan fasilitas khusus ini menjadikan BBPOM di Surabaya sebagai salah satu pusat rujukan nasional dalam pengujian produk hasil tembakau, termasuk dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian tembakau, penegakan kepatuhan industri, dan perlindungan konsumen. Di samping itu, BBPOM di Surabaya ditetapkan sebagai laboratorium koordinator regional Surabaya, yang membawahi dan membina jejaring laboratorium di wilayah timur Indonesia, termasuk BB/Balai POM di Denpasar, Mataram, Kupang serta Loka POM Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat, dan Ende. Penetapan ini menunjukkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi teknis yang diakui

secara nasional, serta menempatkan BBPOM di Surabaya sebagai simpul strategis dalam harmonisasi metode pengujian, standarisasi mutu laboratorium, peningkatan kompetensi personel, serta penanganan sampel prioritas dan kedaruratan.

Dari sisi sarana dan prasarana, laboratorium dilengkapi dengan berbagai peralatan pengujian modern yang mendukung peningkatan akurasi, sensitivitas, dan kecepatan analisis, antara lain: Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy (ICP-MS) untuk analisis logam berat dengan sensitivitas sangat tinggi, Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS/MS) untuk pengujian residu bahan kimia dan kontaminan kompleks, High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC) untuk penapisan cepat bahan aktif, Gas Chromatography with Tandem Mass Spectrometry (GC-MS/MS) untuk identifikasi senyawa volatil dan semi-volatil, Real Time – Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk pengujian mikrobiologi dan deteksi DNA spesifik secara presisi.

Ketersediaan peralatan mutakhir tersebut memungkinkan laboratorium menghasilkan data pengujian yang handal dan berstandar internasional, serta mendukung berbagai program prioritas pengawasan seperti pengawasan pangan olahan, bahan berbahaya, cemaran kimia dan mikrobiologi, obat dan obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta produk hasil tembakau. Dengan demikian, keberadaan laboratorium terakreditasi dengan kapasitas yang kuat, peralatan modern, serta peran koordinatif regional menjadi salah satu kekuatan utama BBPOM di Surabaya dalam menjamin efektivitas pengawasan obat dan makanan serta peningkatan perlindungan masyarakat di wilayah Jawa Timur dan kawasan Indonesia timur.

6. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat

BBPOM di Surabaya memiliki pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang telah terbentuk secara kuat, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan pengawasan obat dan makanan di wilayah Jawa Timur. Ekosistem ini terbentuk melalui kolaborasi multipihak, inovasi edukatif, serta intensitas kegiatan pendampingan yang menjangkau seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, karakteristik wilayah yang heterogen, serta tingginya aktivitas industri pangan, obat tradisional, dan kosmetik, keberadaan ekosistem pemberdayaan yang kokoh menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan.

BBPOM di Surabaya secara konsisten mengembangkan berbagai inovasi pemberdayaan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal, antara lain: Gempur Jatim untuk pendampingan UMK pangan olahan agar memenuhi standar keamanan dan mutu, Jatim Glowing untuk peningkatan

kepatuhan pelaku usaha kosmetik, Sippotra sebagai platform pemberdayaan dan konsultasi bagi pelaku usaha obat tradisional, Cangkrū'an sebagai model edukasi berbasis komunitas dan literasi publik yang lebih dekat dengan masyarakat, Klinik POM sebagai layanan konsultasi jemput bola yang mempermudah pelaku usaha dalam memahami regulasi, dan Jatim Truly sebagai bentuk pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Jawa Timur. Keberhasilan ekosistem pemberdayaan ini tercermin dari meningkatnya partisipasi pelaku usaha, termasuk kenaikan signifikan permohonan sertifikat Izin Produksi (IP) CPPOB UMK Pangan Olahan menjadi 895 pengajuan pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku UMK terhadap pemenuhan standar keamanan pangan, sekaligus mengindikasikan efektivitas model pendampingan yang dijalankan BBPOM di Surabaya dalam mendorong legalitas usaha dan peningkatan daya saing produk lokal.

Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi usaha, serta tokoh masyarakat berkontribusi memperluas jangkauan edukasi risiko, literasi konsumsi aman, dan penguatan gerakan masyarakat sadar pangan aman. Pemberdayaan berbasis komunitas telah dilakukan pada komunitas sekolah, desa, dan pasar. Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas ini dilaksanakan melalui tiga program utama, yaitu Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Ketiga program tersebut menunjukkan tren peningkatan intervensi setiap tahunnya, mencerminkan perluasan jangkauan edukasi dan keberhasilan advokasi BBPOM di Surabaya. Dari tahun 2020 hingga 2024, BBPOM di Surabaya telah melakukan intervensi terhadap: 138 sekolah, 45 desa, dan 30 pasar. Intervensi dilakukan melalui tahapan sistematis mulai dari advokasi kepada pemerintah daerah, penetapan lokus, bimbingan teknis bagi kader sekolah, desa, dan pasar, hingga pendampingan implementasi program keamanan pangan. Efektivitas model pemberdayaan ini terbukti dari capaian prestasi berkelanjutan dalam kompetisi keamanan pangan tingkat nasional yang diselenggarakan BPOM sejak 2020 hingga 2024. Sebanyak 2 desa, 5 sekolah, dan 1 pasar telah berhasil memperoleh juara pada kompetisi tersebut.

Hal ini secara langsung mendukung pengawasan berbasis risiko, mengurangi potensi pelanggaran, serta memperkuat ketahanan pengawasan melalui partisipasi aktif publik. Dengan ekosistem edukasi dan pemberdayaan yang kuat, inovatif, dan berkelanjutan, BBPOM di Surabaya memiliki keunggulan strategis dalam membangun budaya kepatuhan di kalangan pelaku usaha, meningkatkan literasi keamanan

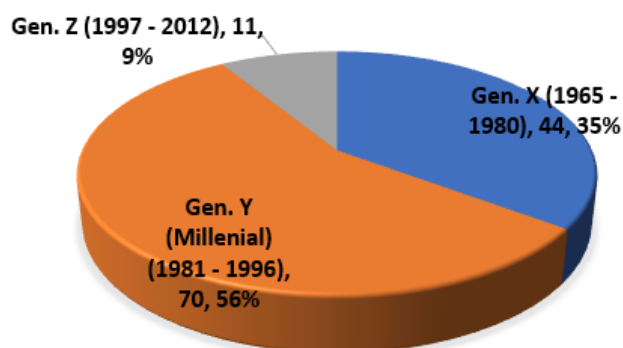
pangan dan obat bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Timur.

I.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terus meningkat, BBPOM di Surabaya tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BBPOM di Surabaya menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BBPOM di Surabaya dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BBPOM di Surabaya, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan distribusi sumber daya manusia (SDM)

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Surabaya sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah SDM Balai Besar POM di Surabaya sampai dengan tahun 2025 sebanyak 144 orang. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja terkini, pemenuhan kebutuhan hanya 68,25%. BBPOM di Surabaya membutuhkan 211 orang pegawai untuk mengawasi 38.394 sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di 27 kab/kota, mengawasi peredaran seluruh produk Obat dan Makanan di pasar, serta melakukan pengujian laboratorium dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan. Oleh karena itu masih terdapat gap kekurangan sejumlah 67 orang pegawai untuk dapat memaksimalkan kinerja pengawasan.



Gambar 1. 17 Profil Pegawai Berdasarkan Generasi (Tahun Kelahiran)

Pegawai BBPOM di Surabaya didominasi oleh generasi Y atau millennial (kelahiran tahun 1981-1996) sebesar 70,56% selanjutnya adalah generasi X (kelahiran tahun 1965-1980) sebesar 44,35% dan yang paling sedikit adalah generasi Z (kelahiran tahun 1997-2012) sebesar 9%. Diperkirakan sebanyak 20 orang pegawai akan pensiun dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2029 sehingga perlu direkrut pegawai baru untuk menggantikan pegawai pensiun tersebut. Kondisi ini juga ditambah dengan mutasi pegawai yang cukup tinggi antar UPT. Jika kebutuhan SDM ini tidak terpenuhi, maka dapat mempengaruhi kinerja pengawasan Obat dan makanan di Jawa Timur.

2. Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan sosiokultural

Meskipun BBPOM di Surabaya memiliki sumber daya manusia yang besar dan terspesialisasi, pemetaan kompetensi tahun terakhir menunjukkan masih terdapat kesenjangan kompetensi yang signifikan, khususnya pada aspek manajerial dan sosiokultural. Dari 126 pegawai yang mengikuti pemetaan kompetensi, terdapat 39 orang (30,95%) yang belum memenuhi standar kompetensi pada kedua aspek tersebut (kondisi Juni 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas non-teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas secara menyeluruh dan menghadapi dinamika lingkungan pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks.

Kesenjangan kompetensi pada aspek manajerial dan sosiokultural berpotensi menimbulkan sejumlah konsekuensi internal, antara lain: 1) Optimalisasi manajemen kinerja belum tercapai sepenuhnya. Pegawai dengan kapasitas manajerial yang belum memadai dapat mengalami kesulitan dalam perencanaan kerja, pengorganisasian tim, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target kerja individu maupun unit. 2) Terbatasnya kemampuan kepemimpinan di tingkat pelaksana dan supervisi. Minimnya kompetensi manajerial menghambat regenerasi talenta internal dan mengurangi kesiapan pegawai untuk mengisi posisi strategis seperti ketua tim atau calon pejabat struktural. 3) Kolaborasi lintas bidang menjadi kurang efektif. Aspek sosiokultural yang rendah dapat mengakibatkan terbatasnya kemampuan komunikasi, koordinasi, dan adaptasi dengan gaya kerja yang berbeda, sehingga menghambat efektivitas kerja tim serta memperpanjang waktu penyelesaian tugas. 4) Risiko meningkatnya konflik internal atau miskomunikasi. Ketidakmampuan dalam mengelola interaksi sosial dan dinamika organisasi dapat memicu potensi konflik kerja, resistensi terhadap perubahan, atau rendahnya kohesi tim. 5) Penurunan kualitas implementasi program perubahan dan inovasi. Pengembangan inovasi

membutuhkan kompetensi manajerial dan komunikasi publik yang kuat. Kesenjangan kompetensi dapat menghambat adopsi teknologi, disiplin pelaporan, maupun efektivitas implementasi SPBE dan RB.

Kesenjangan kompetensi juga dapat memengaruhi peran eksternal BBPOM di Surabaya sebagai instansi pengawas yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Dampak eksternal tersebut antara lain penurunan kualitas layanan dan pembinaan kepada pelaku usaha, kurangnya sensitivitas terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Jawa Timur yang beragam, persepsi publik terhadap profesionalisme institusi berpotensi menurun, efektivitas pengawasan berbasis risiko dapat berkurang, dan kualitas advokasi kebijakan di tingkat daerah dapat tidak optimal.

3. Sistem TI belum terintegrasi optimal akibat keterbatasan integrasi data

Pemanfaatan teknologi informasi memegang peranan strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan obat dan makanan, terutama dalam proses pengumpulan data, analisis risiko, manajemen informasi, serta penyediaan layanan internal dan eksternal. Namun demikian, sistem teknologi informasi yang digunakan BBPOM di Surabaya belum terintegrasi secara optimal akibat keterbatasan integrasi data antar aplikasi, unit kerja, dan pemangku kepentingan terkait. Salah satu permasalahan utama adalah fragmentasi data yang masih terjadi pada berbagai sistem aplikasi seperti SIPT, Spimker, Simpel LPK, e-registrasi RBA, simetris, smart pom, e-sertifikasi CDOB, infalabs, e-meso, e-was, evortal dan masih banyak lagi. Banyak data pengawasan, hasil pengujian laboratorium, data keluhan konsumen, laporan farmakovigilans, hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lain-lain yang tersimpan di aplikasi yang berbeda-beda tanpa mekanisme integrasi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan sulitnya konsolidasi data secara cepat untuk memfasilitasi analisis komprehensif serta pengambilan keputusan berbasis bukti.

Di lingkungan internal, keterbatasan integrasi data berdampak pada inefisiensi proses bisnis, seperti duplikasi entri data, proses verifikasi yang memakan waktu lebih lama, serta kesulitan memantau progres kegiatan secara real-time. Fragmentasi sistem juga menghambat penyusunan laporan kinerja, pemetaan risiko, dan prioritas pengawasan karena data tidak tersedia dalam satu sistem yang terstandar dan mudah diolah. Dari sisi operasional pengawasan, ketidakselarasan antar sistem TI menyebabkan proses tracking dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan menjadi kurang efektif. Beberapa unit tidak memiliki akses terhadap data yang diperlukan secara cepat sehingga koordinasi internal menjadi terhambat. Hal ini mengurangi kelancaran alur kerja dan

menurunkan kecepatan dalam merespons isu-isu pengawasan yang memerlukan tindakan segera. Secara eksternal, keterbatasan integrasi data juga berdampak terhadap sinkronisasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketidaktersediaan data terintegrasi menyebabkan proses pertukaran informasi berlangsung secara manual atau parsial sehingga memperlambat respon terhadap isu kritis seperti KLB keracunan pangan, temuan produk ilegal, atau peningkatan laporan efek samping obat.

Keterbatasan akses data bersama menyebabkan pemangku kepentingan kesulitan memperoleh gambaran menyeluruh terkait kondisi keamanan pangan dan obat di wilayah Jawa Timur. Kondisi tersebut juga menghambat pengembangan layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan data yang komprehensif, akurat, dan saling terhubung. Kurangnya integrasi data berdampak pada rendahnya keandalan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, baik melalui dashboard, layanan konsultasi, maupun kanal edukasi publik. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pengawasan obat dan makanan. Secara keseluruhan, belum optimalnya integrasi sistem TI dan data mengakibatkan menurunnya efisiensi internal, lambatnya alur koordinasi, terhambatnya inovasi layanan publik, dan berkurangnya kemampuan BBPOM di Surabaya dalam memberikan respon yang cepat dan berbasis bukti dalam upaya melindungi masyarakat Jawa Timur dari risiko obat dan makanan. Penguatan integrasi data menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan kapabilitas pengawasan secara menyeluruh.

4. Belum optimalnya dashboard sistem pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini (*early warning*) yang terintegrasi

Sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif memerlukan dukungan infrastruktur analitik dan peringatan dini yang mampu menyediakan informasi secara cepat, akurat, dan terintegrasi antar unit kerja maupun lintas sektor. Namun demikian, implementasi dashboard pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini (*early warning*) pada BBPOM di Surabaya belum berjalan secara optimal, sehingga kapasitas deteksi dini dan respons terhadap potensi ancaman kesehatan masyarakat masih terbatas. Sistem ini idealnya mampu mengintegrasikan data hasil pengawasan, keluhan konsumen, hasil pengujian laboratorium, farmakovigilans, surveilans lapangan, serta laporan kejadian dari fasilitas pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya. Ketidakoptimalan integrasi data menyebabkan proses identifikasi ancaman, analisis risiko, dan eskalasi penanganan menjadi tidak seefektif yang diharapkan. Dalam praktiknya, kesiapsiagaan terhadap insiden

kritis seperti wabah keracunan pangan, penemuan cemaran atau kontaminan baru dalam produk, hingga laporan efek samping obat yang serius dan tidak terduga masih tergantung pada mekanisme manual atau informasi yang datang dari kanal eksternal, yang sering kali terlambat. Kondisi ini mengurangi kemampuan organisasi untuk memberikan respons cepat dan tepat waktu, padahal kecepatan merupakan kunci utama dalam mencegah perluasan dampak terhadap masyarakat.

Selain itu, tingkat pelaporan farmakovigilans dari fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur masih rendah, hanya 54 sarana (4,07%) dari 1.327 sarana yang ada di Jawa Timur pada tahun 2024. Rendahnya partisipasi Fasyankes dalam melaporkan efek samping obat menyebabkan berkurangnya ketersediaan data untuk mendeteksi pola kejadian efek samping yang signifikan, mengidentifikasi obat yang berisiko tinggi, ataupun mengeluarkan peringatan keamanan secara proaktif. Kurangnya pelaporan ini memperlemah fondasi evidence-based decision making dalam aspek pengawasan produk obat. Masih rendahnya kontribusi data dari fasilitas kesehatan mengakibatkan dashboard risiko yang tersedia belum mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai profil risiko wilayah Jawa Timur. Akibatnya, prioritas pengawasan, pemetaan wilayah rawan, serta penentuan respon kedaruratan tidak dapat dilakukan secara optimal. Secara keseluruhan, belum optimalnya dashboard sistem pengawasan berbasis risiko serta sistem early warning yang terintegrasi berdampak pada menurunnya efektivitas deteksi dini, melambatnya respon kedaruratan, dan meningkatnya potensi risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah dengan intensitas peredaran obat dan makanan yang tinggi seperti Jawa Timur. Pengembangan sistem yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan didukung oleh kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem keamanan obat dan makanan secara berkelanjutan.

5. Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan.

Ketersediaan data terpilah, termasuk data berbasis gender, merupakan prasyarat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengawasan obat dan makanan yang responsif dan berkeadilan. Data terpilah memungkinkan analisis yang lebih akurat terkait karakteristik populasi, pelaksana kegiatan, serta sasaran intervensi, sehingga kebijakan yang disusun dapat menjawab kebutuhan spesifik kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk kelompok rentan. Namun demikian, sampai saat ini BBPOM di Surabaya belum memiliki data terpilah/gender yang memadai, hanya terbatas pada jenis kelamin peserta kegiatan penyuluhan atau bimtek terkait Obat dan makanan saja.

Keterbatasan ini berdampak signifikan terhadap kualitas perencanaan dan efektivitas intervensi yang dilakukan. Tanpa data terpilah yang lengkap, analisis kebutuhan kelompok masyarakat termasuk perbedaan perilaku konsumsi, risiko paparan produk, maupun akses terhadap informasi keamanan pangan dan obat menjadi kurang komprehensif.

Dari aspek pengelolaan internal, ketiadaan data terpilah juga menghambat penyusunan strategi pengembangan SDM yang sensitif terhadap isu gender, seperti pemetaan peluang kesetaraan dalam partisipasi pelatihan, pengembangan karier, maupun pengambilan peran strategis. Sementara dari sisi eksternal, ketidaktersediaan data kelompok sasaran menurut karakteristik gender, usia, atau kondisi sosial lainnya menyebabkan intervensi pengawasan dan edukasi berpotensi kurang tepat sasaran dan tidak mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok tertentu secara optimal. Dampak lebih luas dari belum tersedianya data terpilah adalah terbatasnya kemampuan organisasi dalam menyajikan bukti yang kuat terkait efektivitas program dan kontribusinya terhadap pembangunan yang inklusif. Hal ini juga berimplikasi pada rendahnya kualitas pelaporan kinerja berbasis gender dan berpotensi menghambat pencapaian indikator pembangunan yang selaras dengan prinsip kesetaraan gender pada tingkat nasional. Dengan demikian, upaya penguatan sistem pencatatan dan pelaporan data terpilah menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung perencanaan program pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis evidensi.

6. Kurangnya koordinasi penyediaan data terkini yang memadai terkait jumlah, wilayah dan cakupan SPPG serta penerima manfaat MBG, disertai dengan tagging lokasi

Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terkoordinasi mengenai jumlah, wilayah, dan cakupan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) serta penerima manfaat Program Makanan Bergizi (MBG), termasuk informasi tagging lokasi, merupakan elemen penting dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis evidensi. Data tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengawasan, intervensi, dan mitigasi risiko terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) pangan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. Namun demikian, koordinasi penyediaan data terkini antar pemangku kepentingan belum berjalan optimal. BBPOM di Surabaya hingga saat ini belum memperoleh akses yang memadai terhadap data komprehensif terkait pelaksanaan SPPG maupun penerima manfaat MBG, termasuk informasi mengenai persebaran wilayah, jumlah sekolah dan siswa penerima, serta tagging lokasi yang diperlukan untuk pemantauan yang lebih presisi. Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan analisis risiko dan

pemetaan potensi masalah keamanan pangan pada kegiatan SPPG dan MBG. Keterbatasan koordinasi data ini juga berimplikasi pada respons terhadap laporan KLB pangan.

Selama ini, informasi mengenai KLB pangan lebih sering diketahui BBPOM di Surabaya melalui pemberitaan media, bukan melalui sistem pelaporan resmi maupun koordinasi proaktif dari instansi terkait. Hal tersebut menunjukkan belum adanya mekanisme pertukaran informasi yang terstruktur, cepat, dan dua arah antara pemangku kepentingan program MBG dengan BBPOM di Surabaya sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam pengawasan keamanan pangan di Provinsi Jawa Timur. BBPOM di Surabaya belum dilibatkan secara penuh dalam penanganan KLB pada pelaksanaan program MBG, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi tindak lanjut. Minimnya pelibatan ini berdampak pada terbatasnya kontribusi BBPOM dalam memberikan asistensi teknis, melakukan pengujian laboratorium secara cepat, maupun memastikan intervensi keamanan pangan dilakukan dengan standar yang tepat. Kondisi tersebut secara keseluruhan berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan keamanan pangan pada program MBG, memperlambat respons terhadap risiko keamanan pangan, dan mengurangi kualitas perlindungan masyarakat, khususnya anak sekolah sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi data lintas sektor, termasuk pemetaan SPPG, daftar penerima MBG, serta sistem pelaporan KLB yang terintegrasi, menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan penyelenggaraan program yang lebih aman, responsif, dan berbasis evidensi.

I.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BBPOM di Surabaya untuk memposisikan dirinya sebagai UPT pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Surabaya untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Jawa Timur

Pertumbuhan industri pengolahan Jawa Timur pada periode 2020–2024, yang meningkat sekitar 38–39%, memberikan peluang strategis bagi penguatan peran BBPOM di Surabaya dalam mendukung ekosistem

industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Khusus subsektor kimia, farmasi dan obat tradisional yang mengalami kenaikan nilai tambah lebih tinggi (~65%) dibanding rata-rata manufaktur, menunjukkan bahwa permintaan pasar dan kapasitas produksi sektor ini meningkat signifikan. Tren ini membuka peluang besar bagi pengembangan industri obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Peningkatan nilai ekspor produk farmasi juga mencerminkan tumbuhnya daya saing global, yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar dan menarik investasi industri yang membutuhkan pendampingan regulatori yang lebih intensif. Pada saat yang sama, bertambahnya jumlah pelaku industri menengah-besar di Jawa Timur (lebih dari 6.000 perusahaan manufaktur) memperluas basis kemitraan strategis untuk mendorong penerapan standar keamanan, mutu, dan keandalan dalam rantai produksi. Secara keseluruhan, dinamika pertumbuhan tersebut menciptakan peluang besar bagi BBPOM di Surabaya untuk memperkuat perannya dalam pemberdayaan UMKM pangan olahan, fasilitasi percepatan layanan registrasi produk, peningkatan kapasitas industri sediaan farmasi, serta penguatan sistem pengawasan berbasis risiko yang lebih adaptif terhadap ekspansi pasar. Transformasi industri yang sedang berlangsung juga membuka ruang pengembangan inovasi produk (herbal/obat tradisional, suplemen, pangan fungsional), adopsi teknologi produksi yang lebih modern, dan peningkatan ekosistem keamanan pangan berbasis digitalisasi rantai pasok. Dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan pasar dan meningkatnya daya saing industri, BBPOM di Surabaya dapat turut mendorong terciptanya industri farmasi dan pangan olahan Jawa Timur yang lebih kompetitif, berorientasi ekspor, serta semakin patuh terhadap standar keamanan dan mutu.

2. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Jawa Timur merupakan peluang strategis yang sangat signifikan bagi peningkatan efektivitas pengawasan ke depan. Tren data menunjukkan bahwa kinerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BBPOM di Surabaya mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang konsisten pascapandemi. Setelah sempat menurun pada 2021 (91,51) akibat pembatasan tatap muka selama pandemi, tingkat efektivitas KIE terus meningkat hingga mencapai 97,43 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pola komunikasi dan edukasi yang adaptif, serta pemanfaatan berbagai kanal informasi, berhasil memperkuat peran aktif masyarakat dalam memastikan peredaran obat dan makanan aman.

Selain itu, terdapat tren peningkatan indeks kesadaran masyarakat yang sangat signifikan, dari 73,23 pada 2020 menjadi 90,31 pada 2024. Meskipun indeks sempat terdampak isu prioritas nasional seperti vaksin COVID-19 dan kasus sirup obat mengandung EG/DEG, pemulihan cepat menunjukkan bahwa masyarakat semakin responsif terhadap informasi keamanan obat dan makanan. Hasil survei awareness pada 2022–2024 memperlihatkan peningkatan berkelanjutan pada komponen pengetahuan dan sikap masyarakat. Meskipun nilai perilaku masih menjadi komponen terendah terutama terkait kebiasaan membaca label/kemasan, tren peningkatannya pada 2024 (84,60) menunjukkan ruang besar untuk intervensi edukatif yang dapat segera memberikan dampak nyata. Perkembangan positif ini menghadirkan peluang besar bagi BPOM di Surabaya untuk mengakselerasi strategi *community-based surveillance* dan memperkuat jejaring pengawasan berbasis risiko. Masyarakat yang sudah memiliki kesadaran dan pengetahuan tinggi merupakan aset untuk memperluas jangkauan pengawasan melalui pelibatan komunitas, kader keamanan pangan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta platform digital pelaporan masyarakat.

Dengan penguatan kapasitas dan literasi yang tepat sasaran, kesenjangan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku dapat dipersempit, sekaligus meningkatkan kualitas pengaduan terhadap produk ilegal, tidak memenuhi ketentuan, maupun isu kedaruratan keamanan pangan dan farmasi. Terdapat peningkatan pengaduan masyarakat kepada BPOM di Surabaya terkait produk Obat dan makanan yang dianggap tidak sesuai dari 23 pengaduan menjadi 33 pengaduan di tahun 2024. Pengaduan ini selalu ditindaklanjuti serta merta baik melalui penelusuran oleh tim inspeksi atau tim penindakan dengan hasil akhir yang akan disampaikan kembali ke pelapor. Secara keseluruhan, tingginya peran serta masyarakat bukan hanya memperkuat fungsi pengawasan eksternal, tetapi juga membuka peluang untuk membangun ekosistem ketahanan pangan dan farmasi yang lebih partisipatif, responsif, dan berkelanjutan di Jawa Timur pada periode 2025–2029.

3. Produksi dan Konsumsi Pangan Olahan yang Berkelanjutan

Pertumbuhan produksi dan konsumsi pangan olahan yang berkelanjutan di Jawa Timur menjadi peluang strategis bagi penguatan sistem pengawasan dan pembangunan industri pangan yang aman, bermutu, dan kompetitif. Peningkatan jumlah penduduk Jawa Timur yang terus bertambah dari tahun ke tahun secara langsung mendorong meningkatnya kebutuhan pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan. Kondisi ini menciptakan pasar domestik yang besar dan dinamis, sekaligus memperkuat potensi ekspansi industri pangan olahan berbasis keberlanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar pangan olahan

menunjukkan perkembangan pesat. Data menunjukkan bahwa jumlah produk pangan olahan yang beredar dan telah mendapatkan izin terus meningkat signifikan, dari 4.763 produk pangan olahan pada tahun 2022 menjadi 9.479 produk pada awal tahun 2025. Lonjakan hampir dua kali lipat ini mengindikasikan tingginya minat pelaku usaha untuk berinovasi, diversifikasi produk, serta meningkatkan kualitas untuk memenuhi preferensi konsumen yang semakin sadar terhadap keamanan, mutu, dan keberlanjutan produk pangan.

Perubahan perilaku konsumen pascapandemi turut menciptakan peluang baru. Masyarakat semakin memilih produk pangan olahan yang tidak hanya praktis, tetapi juga aman, bernutrisi, dan diproduksi secara bertanggung jawab (sustainable). Tren ini mencakup peningkatan permintaan terhadap produk dengan kemasan ramah lingkungan, proses produksi yang higienis dan efisien, penggunaan bahan baku lokal, dan upaya mengurangi limbah dalam rantai produksi. Sejalan dengan itu, semakin banyak pelaku usaha yang mengadopsi standar keamanan pangan, sertifikasi mutu, dan teknologi pengolahan modern, sehingga memperkuat daya saing produk pangan Jatim di pasar regional dan nasional. Perkembangan ini membuka peluang besar bagi BBPOM di Surabaya dan pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong industri pangan olahan berkelanjutan melalui sistem perizinan yang responsif, edukasi keamanan pangan yang lebih luas, pendampingan UMKM pangan, serta integrasi pengawasan berbasis risiko. Dengan semakin besarnya basis produk dan meningkatnya permintaan masyarakat, ekosistem pangan olahan di Jawa Timur dapat berkembang menjadi industri yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga berkelanjutan, aman, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

4. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Provinsi Jawa Timur memiliki ekosistem industri kesehatan yang berkembang pesat, ditandai dengan tingginya jumlah sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang tersebar di berbagai wilayah yaitu 29.460 sarana.. Kondisi ini memberikan peluang strategis bagi BBPOM di Surabaya untuk memperkuat fungsi pengawasan secara lebih proaktif sekaligus mendorong tumbuhnya inovasi produk dan layanan kesehatan yang berdaya saing. Tingginya aktivitas produksi di sektor kesehatan dan pangan memunculkan kebutuhan terhadap diversifikasi produk, peningkatan kualitas, serta pemenuhan standar keamanan dan mutu. Hal ini menjadi peluang bagi BBPOM di Surabaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan pelaku usaha dalam pendampingan, bimbingan teknis, serta fasilitasi sertifikasi. Dorongan regulasi yang semakin

adaptif, termasuk penyederhanaan proses perizinan melalui transformasi digital BPOM, turut membuka ruang bagi pelaku industri untuk menghadirkan inovasi berbasis teknologi, penelitian, dan pengembangan (R&D).

Pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan olahan dan kosmetik di Jawa Timur menjadi potensi yang terus meningkat. Semakin banyak pelaku UMKM yang terdorong untuk menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing global. Kebutuhan pendampingan intensif, percepatan pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sertifikasi, dan inovasi formulasi menjadi peluang bagi BBPOM di Surabaya untuk memperluas layanan edukasi, asistensi teknis, dan pembinaan pengawasan pre-market. Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis digital (*telemedicine*, *e-pharmacy*, *supply chain* berbasis teknologi) juga memberikan peluang baru dalam penguatan sistem pengawasan. Adopsi teknologi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan industri memungkinkan peningkatan pemantauan keamanan obat, efektivitas pelaksanaan farmakovigilans, serta percepatan deteksi dini peredaran produk ilegal atau tidak memenuhi standar. BBPOM di Surabaya dapat memanfaatkan perkembangan ini untuk memperluas jejaring intelijen pengawasan, integrasi data pengujian, dan pemanfaatan big data dalam analisis risiko.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pangan aman, serta gaya hidup berbasis natural dan herbal membuka peluang pengembangan produk inovatif seperti suplemen kesehatan, fitofarmaka, kosmetik natural, dan pangan fungsional. Tingginya permintaan terhadap produk-produk tersebut memberi ruang kolaborasi antara BBPOM, akademisi, dan industri untuk mempercepat inovasi yang aman, bermutu, dan sesuai regulasi. Berbagai inovasi layanan publik yang telah dikembangkan BBPOM di Surabaya seperti Gempur Jatim, Jatim Glowing, Sippotra, Klinik POM, dan Cangkrū'an menjadi modal penting dalam memperkuat literasi, *compliance*, dan akselerasi inovasi pelaku usaha. Ekosistem ini menciptakan peluang jangka panjang bagi transformasi layanan pengawasan yang lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika industri kesehatan dan pangan olahan. Dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan industri dan inovasi layanan kesehatan di Jawa Timur, BBPOM di Surabaya memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai katalis inovasi, akselerator mutu produk, serta pengawal keamanan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang semakin modern dan berbasis risiko.

5. Percepatan Transformasi Digital nasional

Percepatan transformasi digital nasional yang dicanangkan pemerintah memberikan peluang strategis bagi BBPOM di Surabaya untuk memperkuat efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih terintegrasi, modern, dan adaptif. Jawa Timur, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional serta provinsi dengan infrastruktur digital yang berkembang pesat, menjadi wilayah yang sangat potensial dalam mengakselerasi transformasi digital di sektor kesehatan, pangan, dan industri pendukungnya. Ekosistem digital Jawa Timur yang semakin matang ditunjukkan oleh meningkatnya penetrasi internet, perluasan jaringan telekomunikasi, serta berkembangnya pusat data dan layanan komputasi awan memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik BBPOM di Surabaya. Pemanfaatan infrastruktur tersebut memungkinkan pengembangan sistem pengawasan berbasis risiko yang lebih presisi dan real-time, penguatan sistem informasi layanan publik, serta integrasi data lintas sektor yang lebih efisien untuk mendukung pengambilan keputusan.

Transformasi digital nasional juga mendorong digitalisasi proses bisnis industri obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Digitalisasi ini mencakup otomatisasi proses produksi, *traceability* rantai pasok, penggunaan Internet of Things (IoT), serta sistem manajemen mutu berbasis teknologi. Perkembangan tersebut membuka peluang bagi BBPOM di Surabaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan pre-market dan post-market melalui pemanfaatan big data, analitik prediktif, dan digital audit, sekaligus meningkatkan kapabilitas deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Meningkatnya penggunaan aplikasi kesehatan digital seperti *telemedicine*, *e-pharmacy*, dan platform pemantauan kesehatan memberikan peluang untuk memperluas jejaring pelaporan farmakovigilans dan keamanan pangan. Integrasi data dari sektor pelayanan kesehatan digital dapat meningkatkan cakupan pelaporan efek samping obat, insiden keracunan, atau temuan produk ilegal secara lebih cepat dan akurat. Kondisi ini menunjang peningkatan kapasitas respons BBPOM di Surabaya terhadap risiko keamanan obat dan makanan di masyarakat.

Percepatan transformasi digital juga memperluas ruang inovasi layanan publik. BBPOM di Surabaya memiliki peluang untuk mengembangkan layanan konsultasi daring, edukasi berbasis multimedia, sistem perizinan yang lebih user-friendly, serta kanal pelaporan masyarakat yang terintegrasi dan mudah diakses. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperluas jangkauan pembinaan dan pengawasan hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit

dijangkau. Dari sisi pemerintahan, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional mendorong peningkatan akuntabilitas, integrasi layanan, dan tata kelola berbasis data. Bagi BBPOM di Surabaya, ini menjadi peluang untuk memperkuat integrasi data dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan instansi penegak hukum, sehingga pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan secara lebih kolaboratif dan menyeluruh.

6. Optimalisasi Literasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Jawa Timur

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang valid, cepat, dan mudah diakses terkait obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan membuka peluang strategis bagi BBPOM di Surabaya untuk memperkuat posisinya sebagai sumber rujukan utama informasi yang kredibel di wilayah Jawa Timur. Masyarakat semakin menyadari pentingnya literasi kesehatan dan keamanan pangan, sehingga permintaan terhadap informasi yang akurat dan terverifikasi terus meningkat. Kondisi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kehadiran BBPOM di Surabaya dalam ruang publik, baik melalui kanal digital maupun komunikasi tatap muka. Peluang ini diperkuat oleh capaian BBPOM di Surabaya yang berhasil meraih Peringkat II Kategori PPID Pelaksana UPT BBPOM sebagai Badan Publik “Informatif”, yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi, keterbukaan informasi publik, serta kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi landasan strategis untuk memperkuat peran BBPOM di Surabaya sebagai otoritas informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan edukasi terkait keamanan, mutu, dan gizi produk obat dan makanan.

Meningkatnya paparan informasi di media sosial, platform digital, dan kanal daring turut memperbesar peluang bagi BBPOM di Surabaya untuk mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih inovatif, responsif, dan berbasis data. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital, BBPOM di Surabaya dapat memperluas jangkauan literasi obat dan makanan, menangkal hoaks atau informasi keliru, serta menyediakan edukasi berbasis bukti yang mudah dipahami masyarakat. Keberadaan laboratorium terakreditasi, tenaga ahli yang kompeten, serta sistem informasi yang semakin berkembang menjadi modal kuat untuk menghadirkan informasi ilmiah yang valid dan terpercaya. Peluang ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, komunitas, dan industri dalam menyediakan kanal informasi terpadu terkait keamanan produk. Keberadaan BBPOM di Surabaya

sebagai lembaga otoritatif memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan, serta memperkuat posisi sebagai pengawal keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat Jawa Timur.

7. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan menjadi landasan strategis yang membuka peluang besar bagi penguatan fungsi pengawasan secara lintas sektor di Jawa Timur. Melalui regulasi ini, BBPOM di Surabaya diperkuat dalam menjalankan mandatnya dengan mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, lintas perangkat daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dalam memastikan obat dan makanan yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat. Dengan adanya Inpres tersebut, koordinasi antara BBPOM di Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta pemerintah kabupaten/kota semakin terstruktur. Hal ini membuka peluang pembentukan mekanisme kolaboratif yang lebih efektif, seperti forum koordinasi pengawasan, integrasi program pembinaan, dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan.

Inpres mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengoptimalkan dukungan anggaran, sarana, serta SDM dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Bagi BBPOM di Surabaya dengan cakupan wilayah 27 kabupaten/kota di Jawa Timur, kebijakan ini menjadi peluang untuk memperkuat jejaring pengawasan hingga ke level *grassroot* melalui kolaborasi kader keamanan pangan, penyuluh, dan perangkat daerah terkait. Kebijakan lintas sektor memberi ruang bagi penguatan pembinaan terintegrasi kepada pelaku usaha, khususnya UMKM pangan, obat tradisional, dan kosmetik yang jumlahnya sangat besar di Jawa Timur. Dengan keterlibatan berbagai instansi, pembinaan dapat dilakukan lebih intensif dan terarah, sehingga mempercepat peningkatan level keamanan dan mutu produk lokal. Dengan sistem koordinasi yang dilandasi Inpres, penanganan kasus seperti temuan produk berisiko, peredaran obat ilegal, bahan berbahaya pada pangan, maupun hoaks terkait obat dan makanan dapat dilakukan lebih cepat. Hal ini memberi peluang untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem pengawasan. Inpres memandatkan penguatan metode pengawasan yang lebih modern, termasuk berbasis risiko dan teknologi. Jawa Timur, sebagai provinsi dengan aktivitas industri yang tinggi, memiliki peluang untuk mengembangkan pemetaan

risiko lintas sektor yang lebih akurat sehingga pengawasan lebih tepat sasaran dan efisien. Dengan kerja bersama antara BBPOM di Surabaya dan pemerintah daerah, upaya edukasi publik tentang keamanan obat dan makanan dapat ditingkatkan. Ini membuka peluang peningkatan indeks kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang aman, terutama di daerah dengan kerentanan tinggi terhadap produk ilegal.

8. Dukungan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG berfungsi sebagai kerangka koordinatif yang mempertegas komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Melalui regulasi ini, BBPOM di Surabaya sebagai UPT BPOM memperoleh mandat sesuai tugas dan fungsinya untuk memastikan aspek keamanan pangan, meliputi pengawasan bahan baku berupa pangan olahan, pengawasan sarana produksi dan distribusi, serta pengawasan terhadap penyediaan makanan bergizi yang diberikan secara gratis. Kebijakan ini membuka peluang strategis bagi BBPOM di Surabaya untuk mendukung pencapaian tujuan Program MBG, khususnya dalam peningkatan status gizi masyarakat, melalui serangkaian kegiatan pengawasan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang dirancang secara sistematis, berkesinambungan, berbasis risiko, dan sinergis. Pengawasan BBPOM di Surabaya dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, mencakup seluruh tahapan proses produksi dan distribusi MBG, dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem jaminan keamanan pangan. Dengan dioptimalkannya pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, BBPOM di Surabaya dapat memperluas cakupan pengawasan secara lebih efektif serta meningkatkan perlindungan masyarakat dari potensi risiko kesehatan akibat konsumsi produk pangan yang tidak aman di Provinsi Jawa Timur.

9. Tingginya arus ekspor impor produk Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur baik melalui laut/udara

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu hub utama perdagangan antar provinsi dengan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya sebagai gerbang utama perdagangan domestik dan internasional. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menjadi gerbang ekspor-impor serta jalur utama perdagangan antar pulau yang melayani 19 rute dari 37 rute tol laut, sehingga hampir 80 persen logistik di 19 Provinsi Indonesia Timur dikirim dari Jawa Timur. Selain Pelabuhan Tanjung Perak, terdapat 5 Pelabuhan Pengumpul dan 14 Pelabuhan Pengumpan Regional. Dari sisi transportasi udara, Provinsi Jawa Timur memiliki 9 simpul transportasi

udara yang mencakup 2 Bandar Udara Pengumpul (Bandara Juanda dan Bandara Abd Saleh) dan 7 Bandar Udara Pengumpan yang mencakup Bandar Udara Banyuwangi, Kediri, Trunojoyo, Notojadinegoro, Harun Thohir, Masalembu, dan Pulau Kangean.

Pada tahun 2021 dan 2022, ekspor barang dan jasa Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, didorong oleh pemulihan sektor industri pengolahan serta meningkatnya permintaan dari mitra dagang utama. Sektor manufaktur, terutama industri makanan dan minuman serta tekstil, menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekspor. Memasuki tahun 2023 dan 2024, ekspor Jawa Timur semakin menguat dengan diversifikasi produk ekspor serta peningkatan daya saing di pasar internasional. Pemberian Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) oleh BBPOM di Surabaya juga mengalami peningkatan dari 18.041 di tahun 2021 menjadi 21.909 di tahun 2024.

Arus ekspor impor yang tinggi membuka kesempatan bagi BBPOM di Surabaya untuk memperkuat pengawasan di pelabuhan dan bandara sebagai pintu masuk obat dan makanan dari luar negeri. Hal ini memungkinkan peningkatan efektivitas deteksi dini terhadap produk ilegal, tidak memenuhi syarat, atau berisiko tinggi yang masuk ke Provinsi Jawa Timur. Aktivitas ini memerlukan koordinasi erat antara BBPOM di Surabaya dengan Bea Cukai, Karantina, Otoritas Pelabuhan, dan pihak bandara. Kegiatan ini menjadi peluang untuk membangun mekanisme pertukaran data serta operasi bersama yang meningkatkan ketahanan sistem pengawasan. Tingginya aktivitas ekspor menunjukkan potensi besar industri obat dan makanan di Jawa Timur untuk menembus pasar global. Pengawasan dan fasilitasi oleh BBPOM di Surabaya dapat mendorong pelaku usaha meningkatkan standar mutu dan keamanan sehingga produk lokal semakin kompetitif dan memenuhi persyaratan negara tujuan.

I.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BBPOM di Surabaya. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BBPOM di Surabaya dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BBPOM di Surabaya dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Kejahatan Siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Perkembangan teknologi dan hadirnya era society 5.0 telah mendorong perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat sebagai konsumen, termasuk dalam pola transaksi dan jual-beli produk sediaan farmasi serta pangan olahan. Masyarakat kini semakin mengandalkan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan akses yang sangat mudah hanya melalui perangkat seluler kapan pun dan di mana pun. Kondisi ini diperkuat oleh kompetisi antarplatform *e-commerce* yang terus berkembang untuk menawarkan kemudahan dan kecepatan layanan. Namun demikian, pertumbuhan ekosistem digital tersebut juga membawa risiko yang tidak dapat diabaikan, khususnya terkait meningkatnya kejahatan siber di bidang perdagangan sediaan farmasi dan pangan olahan. Bentuk ancaman yang muncul antara lain peredaran produk palsu, kedaluwarsa, atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai ketentuan BPOM. Sistem *user generated content* (UGC) pada *platform e-commerce* memungkinkan setiap pengguna membuat akun dan mengunggah produk secara bebas, sehingga membuka celah bagi pihak-pihak yang memperjualbelikan produk ilegal yang bertentangan dengan regulasi.

Kejahatan siber tidak hanya terbatas pada penipuan daring, pencurian identitas, atau peretasan, tetapi juga mencakup perdagangan produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara daring yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Kompleksitas ancaman ini menuntut BBPOM di Surabaya untuk memperkuat pengawasan tidak hanya terhadap produk lokal, tetapi juga terhadap produk impor yang masuk dan diperjualbelikan melalui platform digital. Proses identifikasi dan penindakan hukum atas pelanggaran tersebut harus dilaksanakan secara akurat dan konsisten agar risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Hasil pengawasan patroli cyber BBPOM di Surabaya dari tahun 2022 hingga 2024, sebanyak 2.839 tautan yang menjual Obat dan makanan ilegal telah dilaporkan ke Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan sebanyak 2.728 tautan telah di *takedown*. Peningkatan hasil patroli dari tahun ke tahun menunjukkan masih rendahnya kesadaran pelaku penjualan produk ilegal secara online. Apabila tidak direspons dengan strategi yang tepat, kemudahan akses konsumen melalui *e-commerce* berpotensi meningkatkan peredaran produk ilegal secara signifikan.

2. Maraknya penyebaran Hoaks terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam era perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kemudahan akses digital, penyebaran informasi palsu (hoaks) terkait sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi ancaman yang semakin

serius bagi perlindungan kesehatan masyarakat. Hoaks menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform media sosial, sehingga dalam hitungan jam informasi yang tidak benar dapat menjadi viral. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih dahulu terpapar dan mempercayai informasi keliru sebelum memperoleh klarifikasi yang benar dari sumber resmi. Hoaks merupakan bentuk teror informasi yang berdampak signifikan, terutama ketika menyangkut obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar sehari-hari. Karakter konten hoaks yang sensasional, menakut-nakuti, serta memanfaatkan emosi publik, misalnya terkait keamanan keluarga atau ketakutan terhadap bahan kimia membuatnya lebih mudah tersebar dan diterima oleh masyarakat.

Hoaks tidak hanya muncul dari individu yang kurang memahami informasi, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial, misalnya dengan mempromosikan produk alternatif seperti obat herbal atau suplemen tanpa izin edar dengan narasi menyesatkan. Rendahnya literasi kesehatan dan literasi digital turut memperburuk situasi, karena banyak masyarakat belum memiliki kemampuan memadai untuk memverifikasi kebenaran informasi, menilai kredibilitas sumber, maupun memahami isi pesan secara kritis. Penyebaran hoaks mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan bukan sekadar persoalan persebaran informasi yang salah, tetapi merupakan tantangan sistemik yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sains, kebijakan kesehatan, dan institusi pemerintah. Dalam konteks ini, BPOM memiliki peran strategis tidak hanya dalam pengawasan produk, tetapi juga dalam memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih cermat dalam mengakses, memilih, serta menyebarkan informasi terkait obat dan makanan, sehingga risiko terpapar dan terdampak hoaks dapat diminimalkan.

3. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular

Prevalensi penyakit tidak menular di Provinsi Jawa Timur cukup tinggi. Berdasarkan data SKI (Survei Kesehatan Indonesia) tahun 2023, prevalensi diabetes mellitus 2,2% merupakan peringkat 4 di Indonesia dan lebih tinggi dari rata-rata nasional (1,7%). Prevalensi kanker 1,4% lebih tinggi dari rata-rata nasional (1,2%). Prevalensi jantung 0,88% merupakan peringkat 8 di Indonesia dan lebih tinggi dari rata-rata nasional (0,85%). Prevalensi hipertensi 8% sama dengan rata-rata nasional. Prevalensi stroke 9% merupakan peringkat 8 dan lebih tinggi dari rata-rata nasional (8,3%). Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi sektor pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Bagi BPOM, tingginya beban PTM mendorong

adanya pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko terhadap produk yang berkontribusi terhadap faktor risiko yang menjadi pemicunya.

Faktor risiko utama PTM meliputi pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta kelebihan berat badan dan obesitas. Pola makan tidak sehat berupa konsumsi pangan yang tinggi kandungan garam, gula, asam lemak trans, dan lemak jenuh secara berlebih diperkirakan berkontribusi terhadap sekitar 11 juta kematian atau 22% (dua puluh dua persen) dari semua kematian yang diakibatkan oleh PTM. Sementara itu, rokok dan produk tembakau lainnya juga menjadi penyumbang utama beban penyakit kronis, tidak hanya melalui konsumsi langsung, tetapi juga melalui paparan asap rokok bagi masyarakat umum. Kombinasi antara pola makan tidak sehat dan perilaku merokok menciptakan beban ganda bagi pengawasan BPOM, baik dalam hal pengendalian iklan dan promosi, pengawasan peredaran produk, maupun dalam edukasi publik terkait konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman.

Peningkatan prevalensi PTM juga berdampak pada peningkatan konsumsi obat, suplemen kesehatan, dan pangan berklaim. Fenomena ini memicu potensi peredaran produk ilegal, produk dengan klaim kesehatan berlebihan atau menyesatkan, hingga produk dengan kandungan yang tidak sesuai standar. Hal ini menuntut BPOM untuk memperkuat pengawasan pre dan post market secara menyeluruh, termasuk di kanal digital dan e-commerce, guna melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak aman atau tidak sesuai peruntukannya.

Pengawasan terhadap produk tembakau merupakan salah satu bentuk intervensi penting dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada produk tembakau dan rokok elektronik meliputi pengawasan pencantuman peringatan Kesehatan dan pencantuman informasi lain pada kemasan, pengawasan kesesuaian batas maksimal kandungan kadar nikotin dan/atau tar, pengawasan bahan tambahan yang dilarang, pengawasan daftar kandungan rokok elektronik. pengawasan produk tembakau yang dilakukan oleh BPOM secara tidak langsung juga berkontribusi dalam menurunkan prevalensi PTM seperti kanker paru, penyakit jantung, stroke, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), yang sebagian besar disebabkan oleh konsumsi tembakau. Dengan menurunnya angka konsumsi produk tembakau melalui intervensi pengawasan yang efektif, maka faktor risiko utama

PTM dapat ditekan, sehingga berdampak pada penurunan beban penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4. Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR)

Resistensi antimikroba (AMR) merupakan tantangan besar yang semakin mendesak dalam upaya pengawasan obat dan pangan di Indonesia. Penggunaan antimikroba yang tidak tepat pada manusia, hewan, maupun sektor pertanian memicu percepatan munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap terapi. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pengobatan, meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang sulit dikendalikan, serta menimbulkan ancaman terhadap keamanan pangan asal hewan maupun tanaman yang terpapar residu antimikroba. Bahkan, dalam situasi tertentu, AMR dapat menyebabkan meningkatnya angka kesakitan dan kematian, sekaligus menambah beban pembiayaan kesehatan pemerintah.

Isu AMR tidak hanya merupakan persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga tantangan lintas sektor yang menuntut penanganan komprehensif dan terintegrasi. Dalam lima tahun mendatang, penguatan sistem pengawasan menjadi faktor kunci dalam mitigasi risiko AMR. Langkah strategis yang diperlukan meliputi: (a) penyempurnaan regulasi dan penguatan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotik dan antimikroba lainnya, termasuk pemantauan residu pada produk pangan; (b) pengembangan dan digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan kualitas pelaporan, penelusuran, serta analisis data penggunaan antimikroba sepanjang rantai pasok; (c) memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pendekatan one health bersama kementerian/lembaga, pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat; (d) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk memastikan mutu obat dan keamanan pangan yang beredar; serta (e) penguatan edukasi publik dan komunikasi risiko kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat guna mendorong penggunaan antimikroba yang lebih bijak. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, BBPOM di Surabaya akan lebih mampu mengendalikan risiko AMR secara efektif dan mendukung upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

5. Meningkatnya risiko serangan cyber dan kebocoran data

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis pengawasan obat dan makanan semakin memperkuat ketergantungan BBPOM di Surabaya pada sistem informasi dan infrastruktur digital. Namun, perkembangan teknologi ini juga membawa ancaman baru berupa meningkatnya risiko serangan siber, upaya peretasan, serta potensi kebocoran data yang

dapat mengganggu integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan informasi strategis. Ancaman tersebut tidak hanya menasar sistem layanan publik dan basis data internal, tetapi juga berpotensi menyerang sistem pendukung pengawasan seperti aplikasi persuratan, aplikasi kepegawaian, aplikasi pelaporan, dan platform digital yang digunakan untuk pengawasan daring terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan. Serangan siber dapat mengakibatkan lumpuhnya layanan, manipulasi atau hilangnya data, serta menghambat proses pengambilan keputusan berbasis data. Pada konteks pengawasan obat dan makanan, gangguan tersebut berpotensi menurunkan kecepatan respons terhadap insiden keamanan pangan, keterlambatan pelacakan produk berisiko, dan melemahkan koordinasi lintas sektor dalam situasi darurat. Kebocoran data sensitif, baik mengenai hasil pengujian laboratorium, data distribusi produk, maupun informasi pelaku usaha, juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas BPOM sebagai lembaga pengawas.

Meningkatnya digitalisasi layanan publik dan interaksi daring dengan masyarakat turut memperbesar risiko *phishing*, *malware*, hingga akses ilegal pada sistem internal. Keterbatasan kemampuan pertahanan siber, ketidakterpaduan sistem TI, serta belum meratanya budaya keamanan informasi di lingkungan internal memperkuat kerentanan terhadap ancaman tersebut. Oleh karena itu, meningkatnya risiko serangan siber dan kebocoran data menjadi ancaman strategis yang harus diantisipasi melalui penguatan tata kelola keamanan informasi, peningkatan kapasitas SDM dalam mitigasi insiden siber, modernisasi infrastruktur TI, serta penerapan manajemen risiko keamanan siber secara konsisten dan berkelanjutan.

6. Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor

Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jawa Timur sudah mengalami penurunan dari 0,449 di tahun 2020 menjadi 0,347 di tahun 2024. Namun demikian, angka ini masih relatif tinggi dan harus diupayakan untuk segera diturunkan supaya tidak ada lagi ketimpangan gender. Data terpilah yang dimiliki BBPOM di Surabaya masih terbatas, namun dari data peserta KIE yang ada, diperoleh informasi bahwa peserta laki-laki sebanyak 45,51% dan perempuan 54,49%. Hal ini belum sesuai dengan proporsi jumlah penduduk di Jawa Timur yaitu penduduk laki-laki 49,87% dan perempuan 50,13%. Ketimpangan gender berdampak sistemik terhadap efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, seperti adanya ketimpangan akses informasi kritis, perbedaan kebutuhan kesehatan yang kurang diakomodasi, representasi gender di tenaga pengawas dan sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, kesenjangan perlindungan konsumen, dan lain-lain.

7. Meningkatkan risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG

Dalam pelaksanaan Program MBG yang berskala nasional, salah satu ancaman strategis yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatnya peluang terjadinya insiden atau Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Program ini melibatkan rantai proses yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Besarnya cakupan program, ditambah dengan kemampuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbeda-beda dalam memenuhi standar produksi, serta ketidakterseragaman sistem distribusi di berbagai daerah, dapat meningkatkan potensi terjadinya masalah keamanan pangan atau KLB KP.

Di tahun 2025, BBPOM di Surabaya telah menerima sampel dugaan KLB dari program MBG dari kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kediri untuk dilakukan pengujian laboratorium. Insiden tersebut bisa muncul akibat kontaminasi dari praktik pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan yang tidak sesuai, maupun penanganan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Selain menimbulkan dampak kesehatan langsung bagi penerima manfaat, kejadian ini juga berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat, terganggunya aktivitas belajar, hingga melemahkan legitimasi program MBG sebagai program prioritas nasional. BBPOM di Surabaya memiliki peran menjamin keamanan dan mutu pangan pada program MBG melalui pengawasan yang terstruktur, terkoordinasi, dan berbasis risiko.

8. Kerjasama lintas sektor yang belum terjalin secara solid

Kerjasama lintas sektor merupakan elemen kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan obat dan makanan, terutama di wilayah dengan cakupan geografis dan jumlah penduduk yang besar seperti Jawa Timur. Namun, hingga saat ini hanya 6 pemerintah daerah dari 27 kabupaten/kota dalam wilayah kerja BBPOM di Surabaya yang telah membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan bersama BBPOM di Surabaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor masih belum berjalan optimal dan belum merata di seluruh daerah. Minimnya pembentukan tim koordinasi di sebagian besar kabupaten/kota menimbulkan sejumlah ancaman strategis. Pertama, pengawasan menjadi tidak terintegrasi, sehingga informasi, data pelanggaran, serta tindak lanjut penegakan hukum tidak tersinergi dengan baik antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dan BBPOM di Surabaya. Akibatnya, potensi pelanggaran seperti peredaran produk ilegal, penyalahgunaan bahan berbahaya, dan produk

tidak memenuhi syarat tidak dapat ditangani secara menyeluruh. Kedua, ketidakhadiran tim koordinasi di banyak daerah menyebabkan kesenjangan dalam upaya pembinaan pelaku usaha, terutama UMKM pangan dan obat tradisional yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Tanpa dukungan lintas sektor, beban pembinaan dan edukasi masyarakat menjadi tidak merata dan dapat berakibat pada munculnya kawasan rawan pengawasan. Ketiga, lemahnya jejaring koordinasi memperlambat respons pemerintah dalam menghadapi isu pengawasan Obat dan makanan hingga kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP). Di daerah yang belum memiliki tim koordinasi, mekanisme respon cepat sering kali tidak jelas, tidak terstruktur, atau bergantung pada inisiatif individu, sehingga berpotensi memperbesar dampak masalah di lapangan. Dengan belum solidnya kerja sama lintas sektor di sebagian besar wilayah, BBPOM di Surabaya menghadapi risiko meningkatnya beban pengawasan, lambatnya alur eskalasi masalah, dan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan pengawasan obat dan makanan. Jika tidak diperkuat, kondisi ini dapat menjadi hambatan serius dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

9. Belum terwujudnya kesepahaman dengan pihak Kejaksaan dalam penanganan perkara Obat dan Makanan

Belum terbangunnya kesepahaman yang kuat antara BBPOM di Surabaya dan pihak Kejaksaan dalam penanganan perkara Obat dan Makanan menjadi salah satu ancaman strategis yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Pengawasan Obat dan Makanan tidak hanya berhenti pada kegiatan inspeksi namun juga penindakan yang memerlukan proses hukum lanjutan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memastikan perlindungan masyarakat secara optimal. Ketidaksinkronan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan, pembuktian perkara, maupun tingkat ancaman pidana berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian dalam proses penanganan kasus. Hal ini dapat berdampak pada lambatnya proses penuntutan, penolakan berkas perkara, atau bahkan penghentian proses hukum yang seharusnya dapat ditindaklanjuti. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efek jera bagi pelaku usaha nakal, tetapi juga membuka peluang terjadinya pengulangan pelanggaran, khususnya terkait peredaran produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

Ketidakselarasan dengan pihak kejaksaan juga dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat obat dan makanan yang tidak aman. Tanpa adanya kesepahaman yang komprehensif dan

berkelanjutan antara BBPOM di Surabaya dan Kejaksaan di Jawa Timur, maka upaya penegakan hukum menjadi tidak optimal dan berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran. Dengan demikian, belum terwujudnya sinergi dan kesepahaman dengan Kejaksaan merupakan ancaman nyata yang perlu segera diatasi melalui penguatan koordinasi, harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas bersama, serta penyusunan mekanisme kerja yang selaras untuk memastikan penanganan perkara berjalan efisien, konsisten, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

10. Adanya ketimpangan kondisi di beberapa kab/kota di Jawa Timur dalam hal pendidikan dan perekonomian

Meskipun secara persentase kemiskinan di Jawa Timur masuk dalam kategori menengah tetapi secara jumlah absolut Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Wilayah Madura mendominasi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Kabupaten Sampang mencatat angka kemiskinan 20,83% yang jauh di atas rata-rata provinsi. Sebaliknya Kota Batu mencatat angka kemiskinan terendah sebesar 3,06%. Hal ini mencerminkan adanya disparitas kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur.

RataRata Lama Sekolah (RLS) Jawa Timur tahun 2024 mencapai 8,28 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Jawa Timur usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II). Di kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo memiliki akses pendidikan lebih baik serta kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya menempuh pendidikan hingga jenjang lebih tinggi. Namun, hal ini belum merata di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, seperti di wilayah Madura dan daerah tapal kuda (Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo), masih memiliki angka RLS yang lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar.

Adanya ketimpangan kondisi pendidikan dan perekonomian di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi salah satu ancaman bagi efektivitas pengawasan obat dan makanan. Daerah dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki literasi kesehatan dan pemahaman yang terbatas mengenai keamanan pangan, penggunaan obat yang benar, serta pentingnya produk berizin edar. Hal ini meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap peredaran produk ilegal, palsu, maupun pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Di sisi lain, wilayah dengan kapasitas ekonomi yang lemah memiliki banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang menghadapi keterbatasan

dalam memenuhi standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sanitasi higiene, maupun persyaratan perizinan. Kesenjangan ini menyebabkan tingkat kepatuhan pelaku usaha tidak merata, sehingga memicu risiko pelanggaran keamanan produk yang lebih tinggi.

Ketimpangan sosial-ekonomi juga berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan anggaran, sarana, dan SDM untuk program keamanan obat dan makanan. Daerah dengan kapasitas fiskal dan sumber daya yang terbatas cenderung kurang optimal dalam melakukan pengawasan pangan siap saji, pembinaan UMK, maupun pengendalian risiko di tingkat komunitas. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi BBPOM di Surabaya dalam menjaga kualitas pengawasan yang konsisten di seluruh wilayah kerja, karena beban intervensi di daerah dengan risiko tinggi menjadi lebih besar dan memerlukan sumber daya tambahan. Jika tidak ditangani secara komprehensif, ketimpangan pendidikan dan perekonomian ini dapat memperbesar compliance gap, menurunkan efektivitas program keamanan obat dan makanan, serta menghambat pencapaian target kinerja lembaga.

11. Masih tingginya pelanggaran kejahatan obat tradisional mengandung BKO dan kosmetik mengandung bahan berbahaya

Tingginya temuan pelanggaran terkait obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan upaya pengawasan obat dan makanan di Jawa Timur. Berdasarkan peta rawan kasus pada 27 kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Surabaya, terjadi lonjakan signifikan jumlah kasus dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Kasus kosmetik berbahaya meningkat tajam dari 21 kasus menjadi 181 kasus, sementara kasus obat tradisional mengandung BKO melonjak drastis dari 9 kasus menjadi 258 kasus. Sedangkan penyitaan produk kosmetik selama 5 tahun senilai 10,5 milyar rupiah, dan produk obat tradisional senilai 11,7 milyar rupiah.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa peredaran produk ilegal masih sangat masif, didorong oleh berbagai faktor seperti tingginya permintaan masyarakat, kemudahan akses pembelian terutama melalui platform daring, serta strategi pemasaran yang agresif dari pelaku usaha tidak bertanggung jawab. Produk-produk berbahaya tersebut seringkali dipasarkan sebagai solusi instan, lebih murah, dan diklaim memiliki manfaat yang berlebihan, sehingga dengan mudah menarik minat konsumen yang memiliki literasi kesehatan rendah. Dari sisi kesehatan masyarakat, ancaman yang ditimbulkan sangat besar. Obat tradisional

mengandung BKO berpotensi menyebabkan kerusakan organ, gangguan fungsi tubuh, hingga risiko fatal. Sementara kosmetik berbahaya dapat menimbulkan reaksi kulit, keracunan bahan kimia, dan efek jangka panjang seperti gangguan hormonal. Kondisi ini dapat meningkatkan beban layanan kesehatan dan memperluas risiko paparan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia. Bagi BBPOM di Surabaya, tren kenaikan ini merupakan ancaman strategis karena menunjukkan adanya gap dalam pengawasan lintas rantai distribusi, termasuk lemahnya pengendalian terhadap pasar daring, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya peran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan produk ilegal. Tingginya tingkat pelanggaran juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan produk yang beredar dan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan standar kesehatan berbasis masyarakat. Dengan demikian, fenomena meningkatnya peredaran obat tradisional mengandung BKO dan kosmetik berbahaya di Jawa Timur perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai ancaman prioritas yang harus ditangani melalui penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan koordinasi lintas sektor, intensifikasi operasi penindakan, serta edukasi publik yang lebih masif dan terarah.

Tabel 1.2 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strengths	Weaknesses
1. Pelayanan publik yang prima 2. Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang Kuat dan Terukur 3. SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional, dengan spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi 4. Komitmen Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi 5. Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi dilengkapi dengan peralatan yang modern 6. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat	1. Keterbatasan distribusi sumber daya manusia (SDM) 2. Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan sosiokultural 3. Sistem TI belum terintegrasi optimal akibat keterbatasan integrasi data 4. Belum optimalnya dashboard sistem pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini (early warning) yang terintegrasi 5. Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan 6. Kurangnya koordinasi penyediaan data terkini yang memadai terkait jumlah, wilayah dan cakupan SPPG serta penerima manfaat MBG, disertai dengan tagging lokasi

Opportunities

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Jawa Timur
2. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. Produksi dan Konsumsi Pangan Olahan yang Berkelanjutan
4. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan
5. Percepatan Transformasi Digital nasional
6. Optimalisasi Literasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Jawa Timur
7. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor
8. Dukungan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
9. Tingginya arus ekspor impor produk Obat dan Makanan baik melalui laut/udara

Threats

1. Kejahatan Siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Maraknya penyebaran Hoaks terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular
4. Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR)
5. Meningkatnya risiko serangan cyber dan kebocoran data
6. Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor
7. Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG
8. Kerjasama lintas sektor yang belum terjalin secara solid
9. Belum terwujudnya kesepahaman dengan pihak Kejaksaan dalam penanganan perkara Obat dan Makanan
10. Adanya ketimpangan kondisi di beberapa kab/kota di Jawa Timur dalam hal pendidikan dan perekonomian
11. Masih tingginya pelanggaran kejahatan obat tradisional mengandung BKO dan kosmetik mengandung bahan berbahaya

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

II.1 Visi

Balai Besar POM di Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Timur sesuai Keputusan Kepala BPOM yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025–2029. adapun Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan

sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

II.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

BBPOM di Surabaya sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

II.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan

farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Balai Besar POM di Surabaya sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

II.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai BBPOM di Surabaya, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Surabaya akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran

kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM

- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Surabaya periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. <i>Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM</i> 2. <i>Nilai AKIP UPT BPOM</i> 3. <i>Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM</i> 4. <i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan BBPOM di Surabaya 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BBPOM di Surabaya untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan BBPOM di Surabaya sebagaimana tercantum dalam tabel Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBPOM di Surabaya.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBPOM di Surabaya

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih beredarnya produk obat bahan alam yang mengandung BKO dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan Tanpa Ijin Edar	Melakukan Intensifikasi Pengawasan obat bahan alam dan kosmetik	Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi)
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti surat hasil pemeriksaan dari BBPOM Surabaya	Melakukan desk CAPA dengan pelaku usaha secara rutin untuk mempercepat perbaikan ketidaksesuaian	Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi)
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Pembentukan tim TKP2OM (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan) dan atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah	Fungsi Infokom dan Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi)
		Meningkatnya resistensi antibiotika dikarenakan ketidaksesuaian penyerahan antibiotika di sarana distribusi maupun sarana pelayanan kefarmasian	a. Melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian terkait analisa kewajaran penyaluran antibiotik.	Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi)
			b. Melakukan Bimtek dan Advokasi AMR kepada pelaku usaha, lintas sektor dan asosiasi profesi	
		Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam	a. Melakukan koordinasi antar laboratorium untuk mengurangi kesenjangan	Fungsi Pengujian;

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		memenuhi kebutuhan pengawasan (jumlah alat, kondisi alat)	pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT BPOM.	Bagian Tata Usaha
			b. Melakukan perencanaan sampling yang diintegrasikan dengan kalibrasi dan perawatan peralatan, serta dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan grand design pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pemenuhan kemampuan laboratorium dan kondisi laboratorium Balai Besar/Balai POM secara berkala.	
			c. Identifikasi sumber pendanaan lainnya untuk pemenuhan peralatan laboratorium, kalibrasi dan perawatannya	
	Kurangnya pemenuhan komponen bahan habis pakai di laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan (reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding dan suku cadang)		a. Melakukan komunikasi antar laboratorium dengan sharing reagensia, media mikrobiologi dan baku pembanding bahan antar UPT untuk mengurangi kesenjangan pemenuhan dalam pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	Fungsi Pengujian; Bagian Tata Usaha
			b. Melakukan perencanaan sampling yang diintegrasikan dengan perencanaan pengadaan bahan dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	
			c. Identifikasi sumber pendanaan lainnya untuk pemenuhan pengadaan bahan habis pakai di laboratorium laboratorium	
	Kurangnya pemenuhan komponen sarana keselamatan dan		a. Mengaktifkan manajemen tim K3 untuk melakukan identifikasi risiko	Fungsi Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		kesehatan kerja di laboratorium dalam melaksanakan pengujian untuk mendukung pengawasan	keselamatan dan kesehatan kerja serta mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya	dan Bagian Tata Usaha
			b. Mengatur tata letak peralatan di laboratorium agar personil laboratorium dapat bekerja di dalam luasan ruangan yang wajar	Fungsi Pengujian dan Bagian Tata Usaha
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Masih adanya sarana produksi pangan fortifikasi yang tidak menambahkan fortifikan dengan ukuran sesuai dengan ketentuan atau tidak menambahkan fortifikan	1. Melakukan pengawasan kesarana produksi pangan fortifikasi untuk memastikan proses produksi masih dilakukan dan sesuai ketentuan 2. Melakukan Bimtek / FGD kepada sarana produksi pangan fortifikasi	Fungsi Pemeriksaan Inspeksi
3	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Gagalnya kegiatan operasi penindakan untuk ditindaklanjuti Pro Justitia disebabkan belum lengkap dan validnya hasil kegiatan intelijen	Melakukan patroli siber terhadap link/tautan yang menjual sediaan farmasi dan pangan olahan TIE di marketplace dan merekomendasikan untuk dilakukan takedown serta melakukan profiling terhadap link dengan penjualan besar	Fungsi Penindakan
		Lambatnya penyelesaian berkas perkara sediaan farmasi dan pangan olahan untuk mencapai tahap P-21(dinyatakan lengkap) oleh Jaksa Penuntut Umum	Peningkatan kompetensi petugas dalam menyusun analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Fungsi Penindakan
4	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Maraknya penjualan sediaan farmasi dan pangan olahan TIE secara daring di marketplace serta modus penjualan yang terus berkembang	Melakukan patroli siber terhadap link/tautan yang menjual sediaan farmasi dan pangan olahan TIE di marketplace dan merekomendasikan untuk dilakukan takedown serta melakukan profiling terhadap link dengan penjualan besar	Fungsi Penindakan
		Rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan analisis	Peningkatan kompetensi petugas dalam menyusun	

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak tepat sehingga tidak dapat mendeteksi potensi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rendahnya kepatuhan pelaku UMK peserta pendampingan dalam memenuhi standar keamanan dan mutu produk obat dan makanan sesuai persyaratan Cara Produksi yang Baik	a. Pelatihan peningkatan kompetensi pelaku usaha terhadap standar keamanan dan mutu produk obat dan makanan	Fungsi Sertifikasi
			b. Sosialisasi program pendampingan meliputi tahapan, manfaat yang diterima, konsekuensi, dan bila diperlukan testimoni dari peserta pendampingan tahun sebelumnya	
			c. Seleksi dan penggalangan komitmen pelaku usaha peserta pendampingan	
			d. Penyesuaian program agar lebih fleksibel sesuai kebutuhan pelaku usaha melalui program inovasi pendampingan UMK Gempur Jatim, Sippotra, dan Jatim Glowing serta Klinik POM dan Jumpa Desi	
			e. Rekrutmen fasilitator pendamping pelaku usaha	
			f. Monitoring dan evaluasi program pendampingan	
6	Meningkatnya efektivitas KIE	Materi KIE tidak relevan/tidak menarik bagi sasaran audiens (misalnya terlalu teknis, menggunakan bahasa rumit) sehingga pemahaman masyarakat rendah, tujuan KIE tidak tercapai.	Materi KIE menggunakan bahasa sehari-hari dan media audiovisual yang menarik	Fungsi Infokom dan Bagian Tata Usaha
		Jangkauan dan sebaran KIE tidak merata.	Memanfaatkan media digital, media sosial, serta melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi	

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Rendahnya komitmen Pemerintah Daerah untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas)	a. Penerbitan SK Penunjukan Lokus Kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota)	
			b. Pemantauan tindak lanjut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan memastikan adanya replikasi kegiatan oleh Pemerintah Daerah	
7	Layanan Publik UPT yang prima	Belum optimalnya pemenuhan timeline pelayanan publik.	a. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik. b. Melakukan pengelolaan layanan dengan lebih efisien. c. Penambahan SDM pemberi layanan publik, termasuk memanfaatkan tenaga magang mahasiswa untuk membantu layanan publik. d. Sosialisasi nilai-nilai BERAKHLAK kepada seluruh pegawai terutama pemberi layanan publik. e. Melakukan koordinasi efektif dengan fungsi pengujian untuk layanan pengujian	Fungsi Infokom, Fungsi Sertifikasi dan Bagian Tata Usaha
		Pengaduan masyarakat terkait layanan publik tidak ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Melakukan tindak lanjut sesuai dengan konteks pengaduan sampai pelapor menyatakan puas.	
		Kompetensi pelayanan publik tidak sesuai dengan dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan.	Melakukan peningkatan kompetensi pemberi layanan publik agar dapat mengejar tuntutan lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan yang sangat dinamis.	
		Aplikasi layanan publik tidak mendukung tuntutan pengguna layanan publik.	Berkoordinasi dan melaporkan kendala kepada Pusdatin BPOM, serta memberikan informasi	

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
			kepada pengguna aplikasi pada media sosial BBPOM Surabaya.	
		Koordinasi lintas sektor terkait layanan publik yang beririsan dengan BPOM belum dilaksanakan secara optimal	Membangun koordinasi efektif dengan para pemangku kepentingan di daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota melalui komunikasi informal dan kegiatan bersama yang rutin dilakukan.	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat yang senantiasa disosialisasikan secara rutin kepada seluruh pegawai BBPOM di Surabaya dan pengguna layanan b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi	Tim Reformasi Birokrasi Tim Reformasi Birokrasi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan

offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur

manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, Informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
serta Program Makan Bergizi Gratis	sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Surabaya

Untuk mendukung tujuan BPOM khususnya mendukung kebijakan transformasi sosial kesehatan untuk semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan BPOM periode 2025-2029, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Surabaya mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Strategi BBPOM di Surabaya yang akan dilaksanakan sesuai arah kebijakan BPOM adalah:

1. Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko dan digital monitoring untuk memperkuat pengawasan pre dan post market termasuk yang tidak berizin, serta integrasi data farmakovigilans.
2. Melakukan intensifikasi sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk pangan Program Makan Bergizi Gratis dan produk tidak berizin.
3. Mengoptimalkan cyber patrol dan pengawasan e-commerce serta melaksanakan penegakan hukum terpadu (pro-justisia dan non-justisia) bekerja sama dengan Criminal Justice System
4. Menyelenggarakan pendampingan UMKM secara intensif dengan mengembangkan inovasi jempit bola maupun pendampingan secara daring serta mempererat sinergi bersama lintas sektor dan perguruan tinggi untuk mewujudkan UMKM berdaya saing.
5. Memperluas edukasi publik berbasis komunitas dan digital dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kader keamanan pangan melalui pelatihan berbasis risiko.
6. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah serta lintas sektor terkait.
7. Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial serta pengelolaan SDM, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, mengembangkan sistem digitalisasi laboratorium untuk pelaporan dan memperkuat integrasi data dengan pusat.
8. Perkuatan tata kelola reformasi birokrasi dan pengawasan internal yang adaptif terhadap transformasi digital, percepatan layanan publik terpadu berbasis digital, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 3. 2 Arah Kebijakan dan Strategi UPT

ARAH KEBIJAKAN BPOM	STRATEGI BBPOM DI SURABAYA
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko dan digital monitoring untuk memperkuat pengawasan pre dan post market termasuk yang tidak berizin, serta integrasi data farmakovigilans. Melakukan intensifikasi sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk pangan Program Makan Bergizi Gratis dan produk tidak berizin.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Mengoptimalkan cyber patrol dan pengawasan e-commerce serta melaksanakan penegakan hukum terpadu (pro-justisia dan non-justisia) bekerja sama dengan Criminal Justice System.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Menyelenggarakan pendampingan UMKM secara intensif dengan mengembangkan inovasi jemput bola maupun pendampingan secara daring serta mempererat sinergi bersama lintas sektor dan perguruan tinggi untuk mewujudkan UMKM berdaya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Memperluas edukasi publik berbasis komunitas dan digital dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kader keamanan pangan melalui pelatihan berbasis risiko.

ARAH KEBIJAKAN BPOM	STRATEGI BBPOM DI SURABAYA
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah serta lintas sektor terkait.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial serta pengelolaan SDM, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, mengembangkan sistem digitalisasi laboratorium untuk pelaporan dan memperkuat integrasi data dengan pusat.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Perkuatan tata kelola reformasi birokrasi dan pengawasan internal yang adaptif terhadap transformasi digital, percepatan layanan publik terpadu berbasis digital, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Arah kebijakan BPOM menjadi landasan bagi BBPOM di Surabaya dalam menetapkan strategi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja. Setiap arah kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam strategi yang disesuaikan dengan kondisi, tantangan, serta kebutuhan lokal, agar pelaksanaan pengawasan berjalan lebih efektif dan terarah.

Dalam mendukung penguatan pengawasan pre dan post market, BPOM mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans serta memperluas cakupan pengawasan, termasuk terhadap produk dan sarana yang tidak berizin maupun yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis. Menindaklanjuti hal tersebut, BBPOM di Surabaya melaksanakan pengawasan berbasis risiko dan digital monitoring, memperkuat integrasi data farmakovigilans, serta melakukan intensifikasi sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk-produk tersebut.

Selaras dengan arah kebijakan penguatan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BBPOM di Surabaya mengoptimalkan kegiatan cyber patrol dan pengawasan e-commerce, serta melaksanakan penegakan hukum terpadu, baik pro-justisia maupun non-

justisia, melalui kerja sama dengan Criminal Justice System.

Dalam upaya peningkatan regulatory assistance, BPOM menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Strategi BBPOM di Surabaya diwujudkan melalui pendampingan intensif dengan pendekatan jemput bola, pelatihan daring, serta kolaborasi dengan lintas sektor dan perguruan tinggi untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan memenuhi ketentuan keamanan, mutu, serta manfaat produk.

Arah kebijakan BPOM berikutnya berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Menindaklanjuti hal tersebut, BBPOM di Surabaya memperluas edukasi publik berbasis komunitas dan digital serta memperkuat kapasitas kader keamanan pangan melalui pelatihan berbasis risiko agar masyarakat semakin berperan aktif dalam pengawasan produk yang beredar.

Selain itu, peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan juga menjadi prioritas BPOM. BBPOM di Surabaya menindaklanjutinya dengan memperkuat kemitraan bersama pemerintah daerah, lintas sektor, dan berbagai pihak terkait, baik dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat efektivitas dan jangkauan pengawasan.

Dalam hal peningkatan kapasitas dan kualitas pengawasan, BPOM berfokus pada pengembangan SDM, laboratorium, serta transformasi digital. Sejalan dengan itu, BBPOM di Surabaya meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial SDM, memperkuat sistem digitalisasi laboratorium untuk pelaporan hasil pengujian, dan mengintegrasikan data dengan pusat agar pengawasan lebih transparan dan efisien.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan mengenai penguatan dukungan manajemen dan pelayanan publik berbasis elektronik, BBPOM di Surabaya terus memperkuat tata kelola reformasi birokrasi, mengoptimalkan pengawasan internal yang adaptif terhadap transformasi digital, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, terintegrasi, dan berkualitas. Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi strategi BBPOM di Surabaya juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Surabaya menyelenggarakan dua program utama sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia serta Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM. Untuk mewujudkan kedua program tersebut, dilaksanakan kegiatan

sebagai berikut.

a. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia, dalam pelaksanaannya terdiri dari pelaksanaan penyidikan terhadap perkara di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti secara *pro-justitia*. Dalam proses ini, dilakukan gelar perkara, penyusunan dan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan melalui koordinasi dengan Korwas PPNS. Selain itu, BBPOM di Surabaya juga menyusun laporan analisis kejahatan obat dan makanan melalui hasil patroli siber, profiling pelaku pelanggaran daring, serta analisis kerawanan berbasis kewilayahan sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi tindak kejahatan.

Di bidang pelayanan publik, BBPOM di Surabaya melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan sertifikasi terhadap sarana produksi dan distribusi untuk memastikan pemenuhan standar seperti CPOTB, CPKB, CPOB, CDOB, dan SMKPO. Kegiatan ini juga mencakup penerbitan izin, rekomendasi, serta sertifikat hasil uji untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar. Selaras dengan itu, pembinaan terhadap pelaku usaha terutama sektor UMKM terus diperkuat melalui kegiatan pendampingan intensif, baik secara daring maupun langsung, agar mampu memenuhi standar produksi yang baik serta meningkatkan daya saing.

Dalam bidang edukasi dan komunikasi publik, BBPOM di Surabaya aktif melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat luas. Edukasi dilakukan melalui berbagai metode seperti sosialisasi, penyuluhan, kampanye publik, hingga kegiatan berbasis komunitas yang melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Upaya ini turut diperkuat melalui pemberian KIE Farmakovigilans kepada rumah sakit, puskesmas, dan klinik untuk meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan terhadap pentingnya pelaporan efek samping obat.

Selain kegiatan langsung kepada masyarakat, BBPOM di Surabaya juga menyediakan layanan informasi dan pengaduan publik melalui berbagai kanal komunikasi, baik media sosial, website, maupun media elektronik dan cetak. Layanan ini bertujuan memperluas jangkauan edukasi serta membangun kepercayaan publik terhadap upaya pengawasan obat dan makanan.

Dalam aspek teknis, peningkatan kemampuan laboratorium menjadi fokus penting. BBPOM di Surabaya secara berkelanjutan memastikan laboratorium pengawasan memenuhi standar kemampuan laboratorium (SKL) dan *Good Laboratory Practice* (GLP), termasuk pemenuhan ruang

lingkup pengujian, kalibrasi peralatan, serta peningkatan kompetensi personel. Penggunaan alat laboratorium yang sesuai standar juga menjadi bagian dari upaya menjaga mutu hasil pengujian produk.

Pengawasan lapangan dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan sampling dan pengujian terhadap sampel obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta pangan olahan. Sampling dan pengujian dilakukan berdasarkan pedoman sampling dan pengujian BPOM yang berlaku untuk memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan izin edar termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi guna menilai kepatuhan terhadap cara produksi dan distribusi yang baik.

Dalam mendukung keamanan pangan masyarakat, BBPOM di Surabaya turut melaksanakan program berbasis pemberdayaan komunitas seperti Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan. Melalui kegiatan ini dilakukan advokasi lintas sektor, bimbingan teknis, pelatihan kader keamanan pangan, kampanye, serta monitoring dan evaluasi terhadap intervensi yang telah dilakukan.

Seluruh kegiatan tersebut dilengkapi dengan koordinasi lintas sektor melalui penyusunan laporan koordinasi pengawasan yang memuat hasil monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut pengawasan di wilayah kerja.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana BPOM

Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM berfokus pada pelayanan internal termasuk penatausahaan, penilaian, pengalihan, monitoring dan penyusunan laporan BMN. Selain itu pelayanan bagi pegawai BBPOM di Surabaya berupa gaji dan tunjangan serta penunjang operasional dan pemeliharaan kantor.

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Surabaya untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja yang akan menjadi sasaran akhir Balai Besar POM di Surabaya dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Jawa Timur. Matriks ini memuat sasaran kegiatan Balai Besar POM di Surabaya, serta indikator kinerja dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar POM di Surabaya selama periode lima tahun. Oleh karena itu, diharapkan matriks ini sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Matrik Kinerja Balai Besar POM di Surabaya 2025-2029

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,50	90,75	92,00	93,25	94,50
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	88,5	89	89,5	90
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	89	90,75	92	93,5
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75	94,75	95,5	96,25	97
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93	94,2	95,4	96,4	97,4
		12	Persentase label produk tembakau	91	92	93	94	95

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
			dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar					
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80,4	83,2	85,6	88,1	90,3
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11,11	22,22	33,33	48,15	62,96
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	48	54	57	59	62
3	Meningkatnya efektivitas KIE	18	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,69	88,56	89,44	90,32	91,19
		19	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19	20	21	22	22
		20	Jumlah desa pangan aman	6	10	10	10	10
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	4	5	5	5

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	19,57	38,48	57,61	77,39	97,39
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83	84	85	86	87
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang prima	25	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93,98	94	94,1	94,2	94,3
		27	Nilai AKIP UPT BPOM	85,4	85,55	86,2	86,25	86,3
		28	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		29	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,6	3,7	3,8	3,9	4

4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Surabaya periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Periode 2025 – 2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp46.929,11	Rp21.010,86	Rp68.349,90	Rp68.354,90	Rp68.356,70
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp18.418,98	Rp18.999,49	Rp18.999,49	Rp18.999,49	Rp18.999,49
TOTAL	Rp65.348,09	Rp40.010,35	Rp87.349,39	Rp87.354,39	Rp87.356,19

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Periode 2025 – 2029 Berdasarkan Sumber Pendanaan

Sumber Dana	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	Rp62.409,21	Rp37.071,47	Rp84.410,51	Rp84.415,51	Rp84.417,31
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp2.938,88	Rp2.938,88	Rp2.938,88	Rp2.938,88	Rp2.938,88
TOTAL	Rp65.348,09	Rp40.010,35	Rp87.349,39	Rp87.354,39	Rp87.356,19

Pelaksanaan seluruh kegiatan BBPOM di Surabaya diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi BPOM secara nasional.

BAB V

PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Surabaya 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra Balai Besar POM di Surabaya 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level perencanaan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Balai Besar POM di Surabaya secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Renstra Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja di lingkungan Balai Besar POM di Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua fungsi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Surabaya									65.348,09	40.010,35	87.349,39	87.354,39	87.356,19	BBPOM di Surabaya
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									46.929,11	21.010,86	68.349,90	68.354,90	68.356,70	BBPOM di Surabaya
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													BBPOM di Surabaya
	1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Surabaya	89.50	90.75	92.00	93.25	94.50						BBPOM di Surabaya
	2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Surabaya	26	27	28	29	30						BBPOM di Surabaya
	.3	Persentase pangan olahan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Surabaya	90	91	92	93	94						BBPOM di Surabaya
	.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Surabaya	100	100	100	100	100						BBPOM di Surabaya
	.5	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Surabaya	91	92	93	94	95						BBPOM di Surabaya
	6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	Surabaya	88.00	88.50	89.00	89.50	90.00						BBPOM di Surabaya
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surabaya	87.25	89	90.75	92	93.5						BBPOM di Surabaya
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surabaya	85	87	89	92	95						BBPOM di Surabaya
	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surabaya	93.75	94.75	95.50	96.25	97.00						BBPOM di Surabaya
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surabaya	80	82	84	87	90						BBPOM di Surabaya
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Surabaya	93.00	94.20	95.40	96.40	97.40						BBPOM di Surabaya
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Surabaya	91	92	93	94	95						BBPOM di Surabaya
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Surabaya	100	100	100	100	100						BBPOM di Surabaya
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Surabaya	80.40	83.20.	85.60	88.10	90.30						BBPOM di Surabaya
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Surabaya	11,11	22,22	33,33	48,15	62,96						BBPOM di Surabaya
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surabaya	-	81	82	83	84						BBPOM di Surabaya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indokator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans		Surabaya	90	90	100	110	120						BBPOM di Surabaya
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Surabaya	732	732	732	768	768						BBPOM di Surabaya
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Surabaya	1723	1737	1827	1922	2024						BBPOM di Surabaya
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Surabaya	331	344	380	415	446						BBPOM di Surabaya
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Surabaya	524	593	630	670	709						BBPOM di Surabaya
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Surabaya	-	204	204	216	216						BBPOM di Surabaya
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Surabaya	1	0	1	1	1						BBPOM di Surabaya
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Surabaya	1	1	1	1	1						BBPOM di Surabaya
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Surabaya	1	1	1	1	1						BBPOM di Surabaya
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Surabaya	-	4477	4477	4477	4477						BBPOM di Surabaya
	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													BBPOM di Surabaya
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Surabaya	48	54	57	59	62						BBPOM di Surabaya
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Surabaya	82	85	88	90	92						BBPOM di Surabaya
	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT													BBPOM di Surabaya
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Surabaya	87.69	88.56	89.44	90.32	91.19						BBPOM di Surabaya
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Surabaya	19	20	21	22	22						BBPOM di Surabaya
	3	Jumlah desa pangan aman	Surabaya	6	10	10	10	10						BBPOM di Surabaya
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Surabaya	1	4	5	5	5						BBPOM di Surabaya
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya		Surabaya	83.574	83.600	83.650	83.705	83.766						BBPOM di Surabaya
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Surabaya	81	51	58	65	72						BBPOM di Surabaya
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Surabaya	19	20	21	22	22						BBPOM di Surabaya
	RO 4: Desa Pangan Aman		Surabaya	6	10	10	10	10						BBPOM di Surabaya
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Surabaya	1	4	5	5	5						BBPOM di Surabaya
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													BBPOM di Surabaya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Surabaya	19.57	38.48	57.61	77.39	97.39						BBPOM di Surabaya
		RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Surabaya	90	90	91	94	95						BBPOM di Surabaya
		Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Surabaya											BBPOM di Surabaya
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Surabaya	83	84	85	86	87						BBPOM di Surabaya
		RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Surabaya	7	7	7	8	8						BBPOM di Surabaya
		Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												BBPOM di Surabaya
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Surabaya	90	91	92	93	94						BBPOM di Surabaya
		RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		14	14	15	15	15						BBPOM di Surabaya
		Layanan Publik UPT yang prima												BBPOM di Surabaya
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Surabaya	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90						BBPOM di Surabaya
		RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Surabaya	12097	14334	14.339	14.343	14.376						BBPOM di Surabaya
		Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal												BBPOM di Surabaya
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Surabaya	93.98	94.00	94.10	94.20	94.30						BBPOM di Surabaya
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Surabaya	85.40	85.55	86.20	86.25	86.30						BBPOM di Surabaya
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Surabaya	5	5	5	5	5						BBPOM di Surabaya
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Surabaya	3.6	3.7	3.8	3.9	4						BBPOM di Surabaya
		RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Surabaya	1	1	1	1	1						BBPOM di Surabaya
		RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Surabaya	1	1	1	1	1						BBPOM di Surabaya
		RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	Surabaya	7	0	1	1	1						BBPOM di Surabaya
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									18.418,98	18.999,48	18.999,48	18.999,48	18.999,48	BBPOM di Surabaya
		RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Surabaya	1	1	1	1	1						BBPOM di Surabaya
		RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Surabaya	1	1	1	1	1						BBPOM di Surabaya